

BAB II

POTRET KEKERASAN POLITIK, TRAUMA KOLEKTIF, DAN MUNCULNYA GERAKAN AKSI KAMISAN DI JAKARTA

“Kita harus lebih takut kepada rasa takut itu sendiri, karena rasa takut menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita” (Munir)

A. Pengantar

Kekerasan politik dan trauma sebagai bagian dari konteks sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, antara negara dengan masyarakat untuk membangun hegemoni dan kontrol sosial yang membentuk sistem kehidupan masyarakat sehari-hari.¹ Pola kekerasan politik ini terus-menerus terjadi sepanjang pemerintahan Suharto bahkan pasca-Reformasi, sehingga telah membentuk habitus yakni pembiasaan penggunaan kekerasan oleh aktor bersenjata. Di satu sisi, penggunaan kekerasan yang berulangkali terjadi di Indonesia telah membentuk trauma psikologis terhadap korban dan keluarga korban hingga lintas generasi. Trauma psikologis yang dialami individu akibat kekerasan menyebar ke dalam konteks sosial yang lebih luas dan mendorong terbentuknya perlawanannya masyarakat atas penindasan yang berupaya dirawat oleh negara.²

Perlawanannya masyarakat melalui Gerakan Aksi Kamisan di Jakarta sebagai suatu respons dari proses habituasi kekerasan politik yang telah berlangsung lama di bawah rezim Suharto dan bahkan pasca-Reformasi. Aksi Kamisan, dalam istilah

¹ Gupta, “Harnessing Phenomenological Research to Facilitate Consciousness About Oppressive Lived Experience,” 910.

² Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 153.

Elizabeth Drexler, disebut sebagai “situs keadilan” yang merujuk pada dua aspek utama. Pertama, upaya keluarga korban dalam melawan impunitas negara dengan merawat ingatan kolektif mengenai kekerasan politik di masa lalu. Kedua, adanya berbagai pelanggaran HAM Berat masa lalu yang belum terselesaikan seperti, kasus pembantaian Partai Komunis Indonesia (PKI-1965-1966), Peristiwa Tanjung Priok, penembakan misterius, peristiwa penculikan dan penghilangan paksa, Tragedi Mei 1998 di Jakarta, Tragedi Semanggi satu dan dua, serta berbagai pelanggaran HAM lainnya. Kedua alasan ini mendasari terbentuknya ruang sejarah untuk mereproduksi berbagai ingatan tentang kekerasan politik yang terjadi di masa lalu.

Pada bab ini, saya menguraikan konteks historis terkait potret kekerasan politik yang terjadi pada 1997-1998 di Jakarta. Selain itu, saya juga menguraikan tentang dampak kekerasan politik pada korban, keluarga korban, dan bagaimana pengalaman mereka dalam menghadapi trauma dan ingatan traumatis di masa lalu. Terakhir, gambaran tentang kemunculan gerakan Aksi Kamisan dalam merawat ingatan kolektif mengenai kekerasan politik di masa lalu akan disajikan.

B. Potret Kekerasan Politik Pada 1997-1998 di Jakarta

Kekerasan politik merupakan penggunaan kekuasaan dan kekuatan fisik yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu, seperti perang, konflik bersenjata, kediktatoran represif, dan pendudukan militer. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan politik adalah suatu tindakan fisik dan psikologis yang bertujuan untuk mengintimidasi suatu populasi, seperti

melakukan penembakan, penahanan, dan penyiksaan.³ Contoh kekerasan politik ini dapat terlihat di Argentina selama beberapa dekade (tahun 1967 hingga 1983) yang mengakibatkan hilangnya aktivis masyarakat, pembantaian, dan pembunuhan.⁴ Dalam konteks Indonesia, peristiwa kekerasan politik juga telah mewarnai perjalanan sejarah hingga beberapa dekade. Namun, saya hanya akan menguraikan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang keruntuhan rezim Suharto termasuk, penculikan dan penghilangan orang secara paksa, tragedi Trisakti dan kekerasan terhadap perempuan-Tionghoa, dan tragedi Semanggi I dan II.

1. Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa

Praktik penghilangan paksa di Indonesia telah berulangkali terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru, sebagaimana dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi pada tragedi 30 September (1965-1966), penembakan misterius (1982-1985), peristiwa Tanjung Priok (1984-1985), peristiwa Talangsari (1989), peristiwa Geudong dan Pos Sattis lainnya di Aceh (1989-1998), penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi (1997-1998), Tragedi Wasior (2001) dan Tragedi Wamena (2003).⁵ Serangkaian periode bersejarah ini menunjukkan metode penghilangan paksa selama kekuasaan Orde Baru di Indonesia bahkan setelah keruntuhan rezim Suharto.

³ World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva: World Health Organization, 2002).

⁴ Antonius Robben, *Political Violence and Trauma in Argentina* (University of Pennsylvania Press, 2005), 103.

⁵ Amnesty Internasional Indonesia, “Jalan Panjang Menanti Mereka yang Belum Pulang: Indonesia Harus Usut Tuntas Kasus Penghilangan Paksa,” *Amnesty International Indonesia*, August 31, 2023, <https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/jalan-panjang-menanti-mereka-yang-belum-pulang-indonesia-harus-usut-tuntas-kasus-penghilangan-paksa/08/2023/>.

Pada bagian ini, saya secara khusus membahas peristiwa penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998, yang dihilangkan secara paksa oleh rezim Orde Baru. Peristiwa ini dikenal dengan “penculikan aktivis 1997-1998” yang berlangsung pada saat menjelang pemilu 1997, hingga pelaksanaan Sidang Umum MPR 1998. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), peristiwa penculikan dan penghilangan paksa terjadi dalam tiga tahap yaitu, menjelang pemilu 1997 yang berlangsung hingga Mei 1997, dua bulan menjelang Sidang Umum MPR pada Maret 1998, dan menjelang pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998.⁶

Pada 1997-1998, gejolak politik yang semakin memanas diikuti dengan krisis ekonomi yang meningkat di Asia, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran dan ketimpangan sosial. Pada saat yang sama, hal itu memicu munculnya aksi demonstrasi dari berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jakarta. Mahasiswa yang aktif dalam memprotes kebijakan pemerintah selama krisis tersebut mengalami diskriminasi, kekerasan, hingga penculikan terhadap 23 orang penduduk sipil. Namun dari jumlah tersebut, 9 aktivis yang diculik pada periode kedua telah dikembalikan dan 13 aktivis yang diculik pada periode pertama dan ketiga belum kembali hingga sekarang.⁷

Dalam buku yang ditulis oleh Al Araf dan Tofik Pram yang berjudul *Kasus Penculikan Bukan Untuk Diputihkan, Testimoni-testimoni Penabuh Fakta*

⁶ Tim Elsam, *Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan* (Lembaga Elsam, 2012).

⁷ Tim Kontras, *Bahan Advokasi Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu* (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2016).

*Sunyi*⁸ secara jelas merangkum kronologi penculikan dan berbagai tindakan kekerasan yang dialami oleh para aktivis pada 1997-1998 di Jakarta. Misalnya, Al Araf menyatakan bahwa peristiwa penculikan dan penghilangan aktivis telah terjadi sejak April 1997 terhadap simpatisan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pro-Megawati dan pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mega-Bintang. Sedangkan korban penghilangan paksa pada 1998 umumnya merupakan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD).⁹ Sebanyak 23 aktivis yang diculik, satu aktivis ditemukan tewas yaitu Leonardus Nugroho yang kerap disapa Gilang, ditangkap pada Sabtu 23 Mei 1998 dan ditemukan tiga hari kemudian di Hutan Watu Mlioso Kilometer 23, Serangan, Plaosan, Magelang Jawa Timur. Dia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Berdasarkan hasil autopsi, dia ditemukan meninggal dengan luka tusuk di tubuhnya oleh seorang ahli.¹⁰

Sebanyak 9 aktivis yang diculik pada 1997-1998 dikembalikan. Mereka adalah Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Faisol Reza, Raharja Waluya Jati, Mugiyanto Sipin, Aan Rusdianto, Nezar Patria, dan Andi Arief. Mereka adalah aktivis oposisi yang berhasil kembali setelah mengalami berbagai bentuk penyiksaan di pos komandan taktis di Cijantung. Misalnya, aktivis Pius Lustrilanang menyatakan bahwa dirinya mengalami berbagai

⁸ Al Araf dan Taufik Pram, *Kasus Penculikan Bukan Untuk Diputihkan* (Jakarta: Imparsial, 2024).

⁹ Pemerintah Orde Baru menuduh organisasi Partai Rakyat Demokratik dan organisasi-organisasi seperti Serikat Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dapat mengacaukan dan menggagalkan Sidang Umum MPR pada Maret 1998.

¹⁰ KontraS, "Kronik Kasus Penculikan Dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998," *KontraS*, 1998.

bentuk kekerasan selama diinterogasi, ia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang diiringi dengan musik yang begitu keras selama dua hari berturut-turut. Dia dipaksa untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang diikuti dengan pukulan, tendangan, distetrum, bahkan ditidurkan di atas balok es. Secara umum, laporan kesaksian para aktivis yang dikembalikan mengungkapkan berbagai pengalaman yang serupa, yaitu perlakuan yang tidak manusiawi.

Serangkaian peristiwa ini menunjukkan berbagai tindakan kekerasan yang mewariskan trauma psikologis tidak hanya pada penyintas, tetapi juga terhadap keluarga korban yang masih belum tahu kepastian keluarga mereka. Bagaimana pun, sebagian dari mereka kembali dalam kondisi hidup, namun sebagian lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Sebanyak 13 aktivis yang diculik sepanjang tahun 1997-1998 dan belum kembali hingga sekarang. Mereka adalah Yani Afri, Sonny, Noval Al Katiri, Dedi Hamdun, Ismail, Suyat, Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhibin, Abdun Nasser, dan Hendra Hambali.

Ada berbagai motif yang melatarbelakangi tindakan penghilangan orang secara paksa dalam periode kepemimpinan Orde Baru. Dalam kajian yang dilakukan oleh Elsam, terdapat enam motif yang melandasi peristiwa penghilangan paksa, salah satunya adalah aktivitas politik.¹¹ Mendukung argumentasi ini, menurut Usman Hamid, peristiwa penculikan yang terjadi pada sejumlah aktivis yang aktif dalam merespon isu dan kebijakan rezim saat itu saling terhubung.

¹¹ Tim Elsam, *Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan*.

“Ketika itu, mereka menggalang protes untuk melawan penetapan ketujuh kalinya Suharto sebagai Presiden. Sebagian di antaranya bahkan terhubung sejak peristiwa penggulingan kepemimpinan partai PDI oleh pemerintah melalui serangan terhadap kantor PDI pada Sabtu, 27 Juli 1996.”¹²

Terlepas dari aspek yang melatarbelakangi terjadinya penculikan dan penghilangan paksa pada sejumlah aktivis, selama bertahun-tahun keluarga korban masih bertanya: apakah keluarga mereka masih hidup atau sudah mati? Jika mereka masih hidup, dimana ia sekarang, dimana keberadaannya? dan jika sudah meninggal dunia, kuburan mereka ada dimana? Jejak traumatis ini menggambarkan penantian keluarga korban yang terus menunggu kepulangan anggota keluarga mereka.

Secara kontekstual, kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan politik menciptakan ketidakpastian psikologis yang memungkinkan warisan traumatis dari generasi ke generasi. Bahkan, dua puluh tujuh tahun setelah penghilangan, waktu seolah terhenti, impunitas bukan hanya terus-menerus menghalangi pengakuan kejahanan tetapi juga menciptakan trauma yang terus diwariskan hingga lintas generasi.¹³ Oleh sebab itu, pertanyaan yang belum terselesaikan tetap ada dan terus diwariskan hingga sekarang. Paian Siahaan Munandar selaku ayah dari Ucok Munandar Siahaan (korban penghilangan paksa pada 1998 di Jakarta) mengungkapkan:

“Kami akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan, anak kami yang hilang belum kembali hingga saat ini, dan kami ingin agar pemerintah untuk

¹² Pram, *Kasus Penculikan Bukan Untuk Diputihkan*, 14.

¹³ Louis Jonner, Pelopor Khusus PBB, mendefinisikan impunitas sebagai ketidakmampuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia melalui proses hukum, karena mereka tidak menjadi sasaran penyelidikan apa pun yang dapat mengarah pada tuduhan, penangkapan, pengadilan, hukuman, atau kompensasi bagi korban mereka. Lihat Suparman Marzuki dan Mahrus Ali, “The Settlement of past human rights violations in Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1-12.

memastikan hal tersebut, baik kepastian atas keberadaan anak kami maupun kepastian hukum atas anak kami, Ucok.”¹⁴

Kalimat “kami akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan” menggambarkan perjuangan dan harapan Paian untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kejadian kemanusiaan yang dialami oleh putranya, Ucok Munandar Siahaan. Bagaimanapun juga, kejadian ini merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia yang didasarkan pada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2006.¹⁵

Dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pada 1997-1998, sebagian dari mereka yang pernah hilang dikembalikan dan satu aktivis ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, tetapi sebagian besar aktivis lainnya masih belum kembali hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa korban penghilangan paksa tidak terbatas pada orang hilang, tetapi juga mencakup individu yang menderita kerugian. Berdasarkan Pasal 24 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang menyatakan bahwa “korban” berarti orang hilang dan setiap individu yang menderita kerugian sebagai akibat langsung dari penghilangan paksa.¹⁶ Artinya, keluarga dianggap sebagai korban langsung dari peristiwa

¹⁴ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

¹⁵ Natanael Christian Henry Gurinda, “Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional,” *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (2020): 57.

¹⁶ Munif Ashri, Maasba Magassing, and Iin Karita Sakharina, “Hak Atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998,” *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 506–507.

tersebut. Menurut Maria dan Monica, kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan politik tanpa informasi dan kepastian nasib dari orang yang mereka cintai dapat mengakibatkan siksaan psikologis seumur hidup.¹⁷

Kerugian akibat penghilangan paksa terhadap keluarga korban juga tidak hanya terkait pada kondisi psikologis korban, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Paian Siahaan mengungkapkan:

“Setelah kehilangan Ucok, saya mengalami banyak kesulitan. Kami kesulitan ekonomi, biaya yang dikeluarkan ke berbagai tempat mencari anak kami menjadi kesulitan kami saat ini. Apalagi waktu itu, istri saya mulai sakit-sakitan.”¹⁸

Setelah berbagai peristiwa penculikan dan penghilangan paksa terjadi sepanjang 1997-1998, lembaga Kontras dan sejumlah organisasi sipil lainnya berupaya memperjuangkan hak dan keadilan bagi korban. Dalam prosesnya, upaya hukum pernah dilakukan tetapi penyelidikan “kuasi independen” yang diawasi ketat oleh pemerintah lebih cenderung mengarah pada persidangan dan pertunjukan terkontrol dengan menjadikan satu atau dua kambing hitam, setelah itu negara berusaha “mengubur” masalah yang belum terselesaikan.¹⁹ Contoh tipikal ini dapat dilihat dari Pengadilan Dewan Kehormatan Militer dan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang dilakukan terhadap beberapa jenderal untuk kasus penculikan Aktivis Desta (anggota lembaga Kontras) mengungkapkan:

¹⁷ Maria Giovanna Bianchi dan Monica Luci, *Psychoanalytic, Psychosocial, and Human Rights Perspectives on Enforced Disappearance*, 1st ed. (London: Routledge, 2023); Manon Bourguignon, Alice Dermitzel, dan Muriel Katz, “Grief among Relatives of Disappeared Persons in the Context of State Violence: An Impossible Process?,” *Torture Journal* 31, no. 2 (2021): 14–33.

¹⁸ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

¹⁹ Tim Lindsey, “From Soepomo to Prabowo: Law, Violence and Corruption in the Preman State,” in *Violent Conflicts in Indonesia* (Routledge, 2006), 20–21.

“Jawaban dari orang-orang yang tergabung ke dalam Tim Mawar itu terkesan memang ingin melindungi atasannya. Jadi seakan-akan atasannya itu tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka lakukan. Padahal, saat itu beberapa tokoh militer menyatakan bahwa peristiwa itu tidak mungkin dilakukan oleh anak buahnya tanpa diketahui oleh atasannya.”²⁰

Lebih lanjut, Desta menjelaskan dinamika penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut:

“Dari penyelidikan yang dilakukan oleh TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang mewawancara Prabowo (saat itu menjabat sebagai pangkostrad dan dirjen kopassusnya yaitu Muchdi), jadi penghilangan orang secara paksa ini terjadi di bawah dua dirjen Kopassus, yaitu jenderal Prabowo Subianto dan Muchdi PR. Saat Muchdi menjadi dirjen Kopassus, Prabowo yang menjadi pangkostradnya. Panglima kostrad itu dibawahnya Kopassus, jadi urutannya seperti: Pangkostrad, Kopassus dan terus ke bawah. Namun dalam proses penyelidikan, hanya para anggota-anggota Kopassus yang tergabung dalam tim mawar yang diperiksa. Dalam konteks peraturan hukum dan militer, tidak mungkin seorang anggota melakukan tindakan di lapangan tanpa diketahui oleh atasan, komandan, atau panglimanya. Oleh karena itu, Kontras tidak menerima keputusan yang hanya melibatkan tim Mawar karena tidak mempertimbangkan aktor utamanya.”²¹

Pernyataan Desta di atas menunjukkan pentingnya membawa aktor yang dinilai berperan penting dalam tragedi 1997-1998 di Jakarta. Misalnya, sejumlah nama-nama orang penting yang mencakup Letjen Prabowo Subianto (saat itu), Mayjen Muchdi PR, dan Kolonel Chairawan yang dipandang sebagai aktor yang bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis. Meski Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Infanteri Bambang Kristiono, namun pembentukan tim tersebut merupakan perintah khusus yang disampaikan secara lisan oleh Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor

²⁰ Desta, “Anggota Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),” Wawancara, 18 Juli 2024.

²¹ Desta, “Anggota Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),” Wawancara, 18 Juli 2024.

Jenderal (Mayjen) Prabowo Subianto saat itu.²² Selain itu, terdapat beberapa kejanggalan terkait peristiwa penculikan tersebut, terutama karena adanya perbedaan kesaksian di antara keduanya.

Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang kini menjadi Presiden RI membantah tuduhan tersebut dengan berupaya membangun narasi bahwa dirinya hanya menjalankan perintah atasan. Pada saat yang sama, Mayor Inf. Bambang Kristiono mengaku di depan sidang pengadilan bahwa penculikan tersebut merupakan inisiatif pribadinya.²³ Penting juga untuk dicatat, Bambang Kristiono mengaku bahwa timnya hanya menculik Sembilan aktivis dan semuanya telah dibebaskan. Namun, mengingat bahwa masih terdapat tiga belas orang aktivis yang juga dinyatakan hilang dan belum kembali saat ini menjadi pertanyaan besar bagi para aktivis dan keluarga korban. Bagaimana pun, baik Prabowo Subianto maupun Tim Mawar, menolak bertanggung jawab atas nasib dari ketiga belas aktivis yang masih hilang.

Kontroversi mengenai peristiwa penculikan tersebut terus membayangi publik terutama ketika video kesaksian Agum Gumelar (salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira) beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Agum Gumelar mengatakan:

²² Tim Mawar dibentuk untuk mengumpulkan informasi terkait berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dituduh sebagai kelompok radikal dan aktor di balik kerusuhan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pro-Megawati pada 27 Juli 1996. Lihat Verelladevanka Adrymarthanino dan Nibras Nada Nailufar, "Kronologi Penculikan Aktivis 1997/1998," *Kompas*, 30 September, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/30/120000579/kronologi-penculikan-aktivis-1997-1998?page=all>

²³ Aris Santoso, *Anomali Tim Mawar: Kopassus Di Bawah Danjen Prabowo Subianto* (Jakarta: Tirto.id, April 20, 2020), <https://tirto.id/anomali-tim-mawar-kopassus-di-bawah-danjen-prabowo-subianto-ePFA>.

“Tugasnya adalah memeriksa kasus ini, menyelidiki kasus. Kasus pelanggaran HAM berat. Berjalanlah DKP, bekerjaalah DKP, sebulan lebih memeriksa yang Namanya Prabowo Subianto, periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat.²⁴ Lebih lanjut, Agum Gumelar secara gamblang mengungkapkan bahwa ‘Tim Mawar yang melakukan penculikan itu, bekas anak buah saya semua. Saya juga pendekatan dari hati ke hati kepada mereka, di luar kerja DKP. Karena mereka bekas anak buah saya, dong. Di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu betul.’”

Oleh karena itu, dalam persidangan, Prabowo dinyatakan bersalah kemudian dipecat. Dengan kesalahan terbukti yang direkomendasikan supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Terlepas dari aspek tersebut, saling tunjuk-menunjuk diantara para Jenderal mengenai siapa pelaku dibalik penculikan dan kerusuhan 1998 ini menunjukkan ciri keratakan dalam tubuh militer (antara faksi Merah Putih dan Faksi Hijau). Menjelang pemilu 2019, misalnya, Purnawiran Jenderal bintang dua Kivlen Zen, yang mendukung Prabowo Subianto menyatakan bahwa Wiranto adalah dalang kerusuhan dan bertanggung jawab atas peristiwa penculikan terhadap para aktivis. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Wiranto dengan tantangan bahwa dirinya berani melakukan sumpah pocong.²⁵ Jauh sebelum adanya perdebatan antara Kivlan dan Wiranto, Prabowo telah membela diri bahwa Wiranto sudah mengetahui situasi tersebut. Dalam majalah Panji tahun 1999 yang dikutip oleh Tirto.id, Prabowo mengatakan bahwa ‘Dia tahu kok ada perintah penyelidikan itu.

²⁴ Video Agum Gumelar Ungkap Delapan Kesalahan Prabowo (YouTube, 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=F-Eld5KmCjU>.

²⁵ Andita Rahma, *Ditantang Wiranto Sumpah Pocong, Kivlan Zen: Itu Sumpah Setan*, Politik (Jakarta: Tempo, February 26, 2019), <https://www.tempo.co/politik/ditantang-wiranto-sumpah-pocong-kivlan-zен-itu-sumpah-setan-767133>.

Begitu dia jadi Panglima ABRI, saya juga laporkan sedang ada operasi intelijen, Sandi Yudha.²⁶

Menurut Prabowo, sejumlah nama aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diculik oleh Tim Mawar adalah daftar nama-nama yang diberikan oleh polisi setelah kejadian ledakan di rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.²⁷ Oleh karena itu, Tim Mawar menangkap Aan Rusdianto, Andi Arief, Faisol Riza, Mugiyanto, Nezar Patria, dan Raharjo Waluyo Jati dan membawa ke Markas Kopassus, Cijantung. Namun, tiga aktivis seperti Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, dan Pius Lustrilanang tidak termasuk dalam daftar dan menyebutnya sebagai “kecelakaan.”²⁸

Dalam perkembangannya, kasus penghilangan orang secara paksa terus menghadapi tantangan dan mengalami stagnasi dalam beberapa tahun hingga kembali mendapat perhatian melalui rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 September 2009. Rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan adanya dugaan praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam peristiwa tersebut.

Seperti dikutip dalam laporan Elsam, DPR merekomendasikan empat poin utama. Pertama, agar presiden membentuk Pengadilan HAM *adhoc*.²⁹ Kedua,

²⁶ Tim Kolaborasi Tirto, “Persaingan Para Jenderal Di Balik Kasus Penculikan & Kerusuhan 1998,” *Tirto.Id* (Jakarta, February 26, 2020), <https://tirto.id/persaingan-para-jenderal-di-balik-kasus-penculikan-kerusuhan-1998-eA2j>.

²⁷ Peristiwa ledakan yang ditempati oleh kader PRD dinilai oleh para petinggi militer Orde Baru sebagai bentuk ancaman yang sangat serius yang dapat menggagalkan Sidang Umum MPR pada Maret 1998.

²⁸ “Persaingan Para Jenderal Di Balik Kasus Penculikan & Kerusuhan 1998.”

²⁹ Di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, sebuah Undang-Undang disahkan untuk membentuk pengadilan secara khusus dalam memeriksa pelanggaran berat hak asasi manusia.

agar presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. Ketiga, agar pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Keempat, agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.³⁰

Rekomendasi ini menjadi salah satu kabar baik bagi para korban, keluarga, dan para aktivis yang selama ini menanti keadilan dan berharap kepastian keluarganya yang masih hilang. Namun, selama dua tahun berselang dikeluarkannya rekomendasi ini, hanya ada satu rekomendasi DPR yang dilaksanakan. Desta mengungkapkan:

“Pengadilan HAM *ad hoc* belum dibentuk, para korban yang masih hilang belum jelas nasib dan keberadaannya. Meskipun rehabilitasi dan kompensasi kepada para korban telah dilaksanakan pada tahun 2023, namun peraturan tersebut telah berakhir tahun ini. Oleh karena itu, keberlangsungan proses pemulihan melalui rehabilitasi dan kompensasi pada keluarga korban masih belum jelas kedepannya. Terakhir, meski belum diimplementasikan namun telah menjadi agenda pemerintah untuk dilakukan, yaitu rencana ratifikasi *The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.³¹

Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 51 pasal. Dalam Undang-Undang ini, ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia berat yang didefinisikan yaitu, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang ini, pengadilan yang dapat memeriksa pelanggaran HAM di masa lalu disebut pengadilan HAM *Ad Hoc*. Namun, sampai saat ini, hanya ada dua insiden yang berhasil dilaksanakan melalui Pengadilan HAM ad hoc, yaitu insiden Timor Leste dan Tanjung Priok. Lihat Hikmahanto Juwana, “Assesing Indonesia’s Human Rights Practice in the Post Soeharto Era: 1998-2003,” *Singapore Journal of International & Comparative Law*, 7 (2003): 646.

³⁰ Anak Agung Gde Putra et al., *Pulangkan Mereka, Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa Di Indonesia*, 1 (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2012).

³¹ Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) merupakan instrument hak asasi manusia yang mengikat secara hukum yang melarang penghilangan paksa dalam keadaan apa pun. Dalam konteks Indonesia, Rencana ratifikasi Undang-Undang pengesahan Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) ini ditandatangani pada 27 September 2010, melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.

Kegagalan dalam melaksanakan keempat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR menunjukkan suatu pengingkaran janji negara dalam mewujudkan keadilan bagi warga negaranya, pengingkaran terhadap perlindungan HAM, dan pengingkaran terhadap hak-hak korban. Lembaga resmi tidak lagi menjadi titik acuan bersama secara sosial untuk menjamin dan melarang adanya kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat di masa depan. Artinya, kegagalan negara dalam mengungkapkan dan mengembalikan sejumlah korban yang diculik menunjukkan penyangkalan jejak penahanan korban dan kemungkinan menimbulkan pembunuhan mereka berikutnya, sampai keberadaan orang yang hilang ditemukan.

Dorongan untuk menyelesaikan peristiwa penghilangan paksa ini semakin menguat dengan dikeluarkannya laporan tahunan dari Komnas HAM pada Maret 2010, yang menyatakan bahwa peristiwa penghilangan paksa yang terjadi sepanjang tahun 1997-1998 adalah pelanggaran HAM berat.³² Meskipun demikian, ada beberapa tantangan dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Desta mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi secara hukum, UU HAM itu baru diterbitkan pada tahun 2000. Sedangkan berbagai kasus pelanggaran HAM ini terjadi sebelum tahun 2000, sehingga belum ada Undang-Undangnya. Oleh karena itu, untuk

Namun, pengesahan RUU ini menghadapi berbagai tantangan, mengingat bahwa pengesahan RUU ini sudah dua kali masuk ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) oleh DPR, yaitu pada periode 2011-2014 dan 2014-2018. Hal ini dinilai karena dinilai pengesahan RUU tersebut sebagai motif politik untuk menghambat tokoh tertentu dalam pemilu. Lihat, Asia Justice and Rights, “Indonesia: House of Representatives Holds Bill on Protection of All Persons From Enforced Disappearance, Nears Final Approval,” *Ajar*, 30 Agustus 2023, <https://asia-ajar.org/press-release/indonesia-house-holds-bill-on-protection-of-all-persons-from-enforced-disappearance/>

³² Tim Komnas HAM, *Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, Laporan Tahunan Komnas HAM 2010 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), accessed October 1, 2024, [https://www.komnasham.go.id/files/20170223-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-\\$K.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20170223-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-$K.pdf).

kasus penghilangan orang secara paksa ini dapat dibawa ke pengadilan yang disebut pengadilan HAM *adhoc*. Dalam mekanismenya, setelah jaksa agung mengeluarkan penyidikan seharusnya DPR RI mengeluarkan rekomendasi kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM *adhoc*. Namun, karena kasus penghilangan paksa tak kunjung dilanjutkan oleh Jaksa Agung, akhirnya para keluarga korban dan beberapa organisasi pendamping termasuk Kontras membuat audiensi ke DPR terkait bagaimana solusinya. DPR RI kemudian membentuk panitia khusus untuk kasus penghilangan orang secara paksa dengan mengeluarkan 4 rekomendasi. Salah satunya adalah membentuk pengadilan HAM *adhoc*, dan mencari 13 orang yang masih hilang, memberikan pemulihian bagi korban dan ratifikasi, konvensi dan ratifikasi anti penghilangan paksa. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada yang dilaksanakan pemerintah, alasannya karena rekomendasi itu untuk presiden dari tahun 2009. Adapun rekomendasi yang ketiga terkait pemulihan terhadap keluarga korban baru dilakukan tahun lalu (2023). Tahun lalu, presiden membentuk tim PPHAM yaitu penyelesaian yudisial. Meskipun begitu, penyelesaian Non-Yudisial tidak dapat dimaknai sebagai pemulihian atau solusi akhir dari semuanya, karena tugasnya tidak hanya sekedar pemulihan. Pada saat yang sama, kordinasi dari presiden ke lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan proses pemulihannya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, keluarga korban tidak punya hak untuk berobat di Rumah Sakit secara gratis, seperti memberikan BPJS untuk mereka karena ia adalah korban pelanggaran HAM. Selain itu, pihak pemerintah dan pihak rumah sakit tidak tahu akan hal itu. Oleh karena itu, masih banyak hal yang cacat dari pelaksanaannya.”³³

Sejarah kekerasan politik di Indonesia menunjukkan bahwa praktik penghilangan paksa kerap kali digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik kekuasaan di era pemerintahan Suharto. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat berbagai peristiwa yang menggunakan metode penghilangan paksa, seperti pembantaian PKI 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, Tanjung Priok 1984-1985, Talangsari 1989, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Timor Timur, dan lain sebagainya.³⁴

³³ Desta, “Anggota Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),” *Wawancara*, 18 Juli 2024.

³⁴ Mimin Dwi Hartono, *Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional)* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, August 26, 2016), <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html>.

Potret dinamika kekerasan politik tersebut memperlihatkan bahwa ada upaya untuk menyangkal kejahatan negara, sehingga menciptakan warisan traumatis dalam jangka waktu yang panjang pada keluarga korban. Warisan kekejaman masa lalu yang tidak dicegah dan diberantas akan terus berdampak pada masa depan Indonesia. Mendukung argumen ini, menurut Annie Pohlman, jika tidak ada bentuk keadilan dan pengakuan atas pelanggaran berat yang telah dilakukan negara terhadap ratusan ribu warga sipil di bawah rezim Suharto, maka budaya impunitas di Indonesia tidak akan pernah selesai.³⁵ Seperti penyiksaan dan berbagai perlakuan buruk yang dialami oleh warga sipil karena kurangnya perlindungan kelembagaan atau mekanisme yang memadai untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM.

2. Tragedi 13-15 Mei 1998

Tingkat kekerasan politik yang tinggi di Indonesia telah mendefinisikan budaya politik dan krisis demokrasi dalam waktu yang panjang. Penggunaan kekerasan yang berulangkali terjadi pasca peristiwa penculikan dan penghilangan paksa menunjukkan habituasi penggunaan kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Trisakti 13-15 Mei 1998 yang mengakibatkan empat mahasiswa dari Universitas Trisakti meninggal akibat tembakan aparat keamanan. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidhin Royadi, dan Hendrawan Sie.

³⁵ Annie Pohlman, *An Ongoing Legacy of Atrocity Torture and The Indonesian State* (Routledge, 2013), 37–38.

Demonstrasi ekstensif menentang Soeharto semakin meningkat pasca penembakan yang menewaskan empat orang mahasiswa dari Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998.³⁶ Pada saat yang sama, peristiwa penjarahan dan pemerkosaan terjadi pada 13-15 Mei di berbagai kota, terutama di Jakarta dan target utama tindakan ini adalah orang Tionghoa-Indonesia. Informasi ini baru mulai menyebar di media cetak sekitar tiga minggu setelah kerusuhan di Jakarta. Sebelumnya, media mencerahkan perhatiannya pada klaim yang tersebar bahwa kerusuhan yang terjadi setelah penembakan Trisakti bukanlah tindakan spontan perilaku kriminal, melainkan diatur dan dilakukan secara sistematis. Desta mengungkapkan:

“Dalam peristiwa kekerasan politik pada 1997-1998, kami memilih menggunakan kata ‘tragedi’ dibandingkan ‘kerusuhan’ karena bentuknya yang kerap kali mengindikasikan bahwa masyarakat yang menjadi aktor dalam peristiwa tersebut. Sedangkan berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa tersebut menunjukkan adanya sistem terstruktur dan terkoordinasi.”³⁷

Meskipun kelompok swadaya non-pemerintah memiliki bukti-bukti terkait tragedi Mei 1998 di Jakarta dan menuntut agar pemerintah membentuk penyelidikan atas kebenaran tentang kekerasan Mei 1998, namun pemerintah dan militer dengan segera menolak permintaan tersebut.³⁸ Pada saat yang sama, perhatian publik beralih dengan cepat saat laporan media muncul menginformasikan peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa

³⁶ Himawan, Pohlman, and Louis, “Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories,” 248.

³⁷ Desta, “Anggota Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),” *Wawancara*, 18 Juli 2024.

³⁸ Sai Siew Min, *Eventing the May 1998 Affair: Problematic Representations of Violence in Contemporary Indonesia*, 1st ed. (Routledge, 2005), 44.

Indonesia yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998. Oleh karena itu, kontroversi atas kebenaran peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh perempuan keturunan Tionghoa-Indonesia menjadi perdebatan publik.

Menurut Sai Siew Min, klaim kebenaran berakar pada definisi tindakan massa sebagai “kerusuhan spontan” atau sebagai konspirasi yang disponsori oleh negara (artinya; bukan tindakan kriminal) menjadi bukti perebutan klaim tersebut.³⁹ Terlepas dari perdebatan kebenaran peristiwa ini, keheningan yang dialami oleh korban membantah penutupan, yang sebaliknya mengarahkan perhatian publik menjadi subyek kontroversial. Sebenarnya pada awal Juni 1998, para feminis dan aktivis hak asasi manusia telah menerima laporan terkait perkosaan dari korban, keluarga korban, serta teman-teman korban.⁴⁰

Beberapa bulan setelah peristiwa terjadi atau setidaknya akhir tahun, informasi mengenai peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia menghantui publik, karena satu kontroversi mengenai mereka mengikuti yang lain. Dengan kata lain, wacana publik tentang kerusuhan Mei 1998 juga diikuti oleh peristiwa besar lainnya yang menunjukkan warisan memori kolektif yang tak terlupakan di Jakarta. Terlebih lagi, kasus pemerkosaan mencapai kesadaran publik pada awal juni 1998. Berdasarkan laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) mengenai perkosaan bahwa sebanyak 168 korban yang dilaporkan, 20 kematian, dan hanya lima puluh dua

³⁹ Min, *Eventing the May 1998 Affair: Problematic Representations of Violence in Contemporory Indonesia*, 41–45.

⁴⁰ Nugroho Johannes, “Indonesian Activist Lifts Lid on Rape of Chinese Women in May 1998 Riots: ‘It Was a New Low,’” *South China Morning Post*, May 26, 2023, <https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3221871/indonesian-activist-lifts-lid-rape-chinese-women-may-1998-riots-it-was-new-low>.

kasus yang dikonfirmasi oleh Tim pemerintah. Selain itu, tak ada satu pun set angka ini yang dapat dipandang mewakili bilangan riil. TRuK membandingkan lokasi perkosaan dengan lokasi kerusuhan dan kesimpulan dari laporan awalnya adalah bahwa perkosaan terjadi di banyak daerah yang berkonsentrasi di Cina.⁴¹

Seperti halnya dalam kasus kerusuhan, peristiwa pemerkosaan Mei juga dibingkai dan didefinisikan menjadi sangat bermasalah. Menyadari hal ini, berbagai organisasi swadaya non-pemerintah di Jakarta berupaya untuk merekonstruksi pengetahuan umum tentang apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) yang dipimpin oleh Pastor Sandyawan menggunakan laporan saksi mata yang dikumpulkan dari warga, keluarga, teman-teman korban, dan para profesional dari lembaga keagamaan dan swadaya lainnya. Laporan dokumentasi tersebut berjudul “Dokumentasi awal 1, 2, dan 3.⁴² Secara umum, laporan-laporan ini menunjukkan penolakan terhadap pemahaman populer tentang kerusuhan yang disebut sebagai tindakan spontan yang dilakukan oleh massa miskin kota yang marah.

Penolakan atas anggapan tindakan massa miskin kota pada peristiwa penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia didasarkan pada bukti yang menunjukkan adanya “pola” dalam

⁴¹ Tim Relawan untuk Kemanusiaan, *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998* (Komnas Perempuan, 1998), https://id.wikisource.org/wiki/Indeks:Temuan_Tim_Gabungan_Pencari_Fakta_Peristiwa_Kerusuhan_Mei_1998.pdf.

⁴² *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*.

tindakan kekerasan, sehingga mustahil untuk menyebutnya sebagai tindakan spontan.⁴³ Pola yang dimaksud adalah serangkaian informasi yang menyebar sebelum peristiwa kerusuhan dan pemerkosaan yang oleh relawan sebut sebagai “pengkondisian massal.” Informasi tentang akan adanya penjarahan dan kerusuhan di wilayah-wilayah tersebut tersebar sebelum peristiwa itu terjadi, melalui telepon, dari pengemudi dan pekerja di layanan transportasi umum yang kemudian menarik kerumunan orang di sekitar lokasi kejadian seperti pusat perbelanjaan di Mall Plaza Yogyakarta dan daerah pemukiman.⁴⁴

Pasca tragedi mengerikan yang terjadi selama 13-15 Mei 1998 di Jakarta, perlawanan yang lebih besar muncul keesokan harinya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sejumlah mahasiswa mulai berdatangan di depan gedung DPR/MPR RI dengan tujuan meminta pertanggungjawaban terhadap Soeharto atas peristiwa kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Jakarta.⁴⁵ Selama empat hari para aktivis mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR RI dan menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia, hingga pada tanggal 21 Mei 1998, Suharto secara resmi mengundurkan diri.

3. Tragedi Semanggi I dan II

⁴³ Komnas Perempuan, “Sambutan Ketua Komnas Perempuan Peringatan Tragedi Mei 1998,” *Komnas Perempuan*, May 13, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/sambutan-ketua-detail/sambutan-ketua-komnas-perempuan-peringatan-tragedi-mei-1998>.

⁴⁴ Min, *Eventing the May 1998 Affair: Problematic Representations of Violence in Contemporary Indonesia*, 42.

⁴⁵ Kasus Trisakti, *Semanggi I dan II*.

Kekerasan politik seperti pembantaian, penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, dan berbagai ancaman terhadap oposisi terus-menerus dilakukan oleh aktor bersenjata bahkan pasca-Reformasi. Mengingat bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, namun penggunaan kekerasan tampaknya telah menjadi alternatif dalam menciptakan hegemoni kekuasaan bahkan sejak Suharto secara resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini dapat terlihat dari peristiwa yang dikenal dengan tragedi Semanggi I, yang terjadi pada 8-14 November. Sebanyak 18 mahasiswa meninggal dunia, empat di antaranya, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, dan BR Norman Irmawan (wawan), dan sebanyak 109 orang yang terdiri dari masyarakat sipil dan mahasiswa mengalami luka-luka.⁴⁶

Peristiwa kekerasan terus berlanjut yang ditandai dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa untuk menolak rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) pada September 1999. Selama aksi berlangsung, aparat keamanan kembali menggunakan langkah yang sama dengan menembaki para peserta aksi, relawan kemanusiaan, tim medis, dan masyarakat, yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Salah satunya adalah Yap Yup Hap yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia, yang tertembak di bilangan Semanggi

⁴⁶ Kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

Jakarta, sementara 271 orang mengalami luka-luka. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Semanggi II.⁴⁷

Kekerasan politik yang terjadi dengan latar belakang kekerasan sosial seringkali tertanam dalam tindakan sehari-hari dan telah menjadi ciri kehidupan yang dinormalisasi sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan negara. Oleh karena itu, tak mengherankan jika kekerasan politik dapat mempengaruhi kondisi psikologis individu dan sosial. Menurut McIlwainne dan Moser, kekerasan endemik dapat menyebabkan ketakutan dan ketidakamanan yang sebagian besar berdampak pada konteks sosial, khususnya korban kejahatan negara karena dibiarkan menavigasi dirinya sendiri setelah pengalaman kehilangan yang menyakitkan.⁴⁸

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, serangkaian peristiwa kerusuhan yang terjadi sepanjang 1997-1998 di Jakarta menunjukkan segudang pola kekerasan yang dapat mengakibatkan trauma psikologis terhadap korban. Dengan demikian, dimensi trauma individu dan sosial pasca kekerasan negara merupakan fenomena yang penting untuk dipahami lebih mendalam.

C. Trauma Kolektif Pasca Tragedi 1997-1998 di Jakarta

Trauma kolektif merupakan efek signifikan yang muncul akibat kekerasan yang terus-menerus terjadi. Artinya, situasi yang mendorong individu dan sosial hidup

⁴⁷ Zein and Alfian, “The Pattern of Collective Memory Denial Experienced by the Student Victims’ Mothers of 1998-1999 Trisakti-Semanggi Tragedy.”

⁴⁸ Cathy McIlwaine and Caroline O. N. Moser, “Violence and Social Capital in Urban Poor Communities: Perspectives from Colombia and Guatemala,” *Journal of International Development* 13, no. 7 (2001): 965.

dengan penuh ancaman konstan dari kekerasan. Sosiolog Kai Erikson menyatakan bahwa penindasan sosial politik yang dialami masyarakat dapat menciptakan “trauma kolektif” yang ia definsikan sebagai pukulan terhadap jaringan dasar kehidupan sosial yang merusak ikatan.⁴⁹ Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa trauma kolektif, meskipun tidak terjadi atau dialami oleh semua anggota masyarakat tertentu, namun secara bertahap dapat menghantui jiwa individu-individu (generasi-generasi setelah kerusuhan) dan ingatan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi.⁵⁰

Kekerasan politik yang terjadi sepanjang tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada Mei 1998 di Jakarta telah mewariskan trauma bagi penyintas dan keluarga korban. Untuk melihat bagaimana korban dan keluarga korban kejadian negara berpikir tentang diri mereka sendiri, pengalaman trauma individu dan sosial penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Menurut Barber, pengalaman dan efek kekerasan politik sangat terkait dengan konteks, durasi, dan memiliki makna subjektif kekerasan yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari individu ke individu yang lainnya.⁵¹

Kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan politik merupakan asumsi yang mendasari munculnya trauma individu dan sosial.⁵² Beberapa narasumber

⁴⁹ Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-from Domestic Abuse to Political Terror*, 41.

⁵⁰ Katrin Antweiler, “Why Collective Memory Can Never Be Pluriversal: A Case for Contradiction and Abolitionist Thinking in Memory Studies,” *Memory Studies* 16, no. 6 (2023): 1530.

⁵¹ Brian K Barber, “Contrasting Portraits of War: Youths’ Varied Experiences with Political Violence in Bosnia and Palestine,” *International Journal of Behavioral Development* 32, no. 4 (2008): 306.

⁵² Carolina López C, “The Struggle for Wholeness: Addressing Individual and Collective Trauma in Violence-Ridden Societies,” *Explore* 7, no. 5 (2011): 302–303.

menyatakan bahwa pandangan dunia mereka berubah melalui pengalaman kehilangan anggota keluarga mereka. Artinya, kehilangan keluarga mereka dibedakan dari pengalaman kehilangan pada umumnya karena sifat dari kekerasan politik itu sendiri. Dampak kekerasan jenis ini menunjukkan bahwa kehilangan traumatis menimbulkan kesulitan, rasa sakit yang mendalam, penyesalan, dan dalam banyak hal menghancurkan keberlangsungan kehidupan keluarga korban. Dengan demikian, untuk memenuhi syarat tentang sejauh mana kehilangan traumatis mereka, asumsi mendasar dalam penelitian ini merujuk pada pengalaman traumatis keluarga korban yang dapat dipahami melalui kata-kata dan refleksi atas pengalaman mereka sendiri.

Dalam beberapa laporan, keluarga korban menghadapi trauma akibat kekerasan politik yang mengakibatkan kehilangan putra mereka. Misalnya, dalam laporan Komnas Perempuan, penghilangan paksa berdampak buruk terhadap perempuan:

Mama juga depresi dan selalu menyanyi, “anakku yang hilang di mana dan kapan pulang.” Mama terus sakit, sampai mama pernah dibawah ke Rumah Sakit Jiwa Grogol sama keluarga karena dianggap gila. Bapak juga mengalami hal serupa. Mungkin kalau bapak karena laki-laki jadi dia memendamnya. Akan tetapi, saat terakhir dia mau meninggal, dia melihat keluar katanya abang menjemputnya. Orang semua memanggilnya karena yang dipeluk itu tiang listrik.⁵³

Pernyataan keluarga korban di atas menunjukkan bahwa penghilangan orang secara paksa tak hanya melanggar norma hukum tentang hak asasi manusia universal, namun juga telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut

⁵³ Komnas Perempuan, *Kertas Rekomendasi Kebijakan*, Kertas Posisi (Komnas Perempuan, 2021), <https://komnasperempuan.go.id/kertas-posisi-detail/kertas-rekomendasi-kebijakan-komnas-perempuan-tentang-pentingnya-pemerintah-indonesia-meratifikasi-konvensi-internasional-untuk-perlindungan-semua-orang-dari-penghilangan-paksa-dan-dampaknya-terhadap-perempuan>.

Ignacio Martin Baro, trauma hadir ketika seseorang ditandai dengan “residu permanen dari apa yang terjadi” dan itu dipahami sebagai trauma karena berdampak buruk terhadap korban serta menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan pada kehidupan seseorang.⁵⁴ Demikian pula, Ronnie Janoff Bulman menyatakan bahwa peristiwa kehidupan traumatis menghancurkan asumsi mendasar manusia dalam melihat dunia.⁵⁵ Salah satu penyintas dalam peristiwa penculikan 1998 yaitu Mugiyanto mengatakan:

“Kadang kalau saya sedang berjalan di trotoar, saya membayangkan tiba-tiba ada yang mengambil saya dari belakang. Saya juga masih trauma setiap kali melihat seibo.”⁵⁶

Pernyataan Mugiyanto menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan di masa lalu berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup bahkan setelah bertahun-tahun peristiwa penculikan dialaminya. Oleh karena itu, menurut Martin Baro, trauma sosial harus dipahami melalui cara dan proses sejarah mempengaruhi populasi individu dan sosial.⁵⁷ Dalam artian, trauma sosial terkait erat dengan dinamika historis dan sosial yang telah mengancam jiwa individu dan berlanjut dalam interaksi yang dimediasi antara individu dan masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun dampak trauma sering dimanifestasikan dalam trauma individu, namun trauma itu sendiri diproduksi secara sosial, sehingga saling terkait satu sama lain.

⁵⁴ Ignacio Martín-Baró, “Political Violence and War as Causes of Psychosocial Trauma in El Salvador,” *International Journal of Mental Health* 18, no. 1 (1989): 3–20.

⁵⁵ Ronnie Janoff-Bulman, “Posttraumatic Growth: Three Explanatory Models,” *Psychological Inquiry* 15, no. 1 (2004): 33.

⁵⁶ Pram, *Kasus Penculikan Bukan Untuk Diputihkan*, 5.

⁵⁷ Martín-Baró, “Political Violence and War as Causes of Psychosocial Trauma in El Salvador,” 13.

⁵⁸ Pilar Hernández, “Trauma in War and Political Persecution: Expanding the Concept,” *American Journal of Orthopsychiatry* 72, no. 1 (2002): 16–25.

Pada saat yang sama, pertumbuhan pasca-trauma juga muncul di kalangan korban dan keluarga korban pasca kekerasan. Pertumbuhan pada tingkat pribadi dan kolektif ini menjadi titik awal yang dapat membantu membangun asumsi baru tentang dunia yang membantu korban mengatasi rasa kehilangan. Anggota komunitas, baik yang secara langsung mengalami perlakuan buruk di masa lalu maupun yang tidak secara langsung mengalami kekerasan. Mereka secara sadar mulai menginternalisasi dan mempengaruhi ingatan mereka dengan insiden traumatis yang terjadi di masa lalu. Menurut Mieke Bal, memori budaya sebagai sesuatu yang dapat dipahami melalui aktivitas yang terjadi di masa kini, yang memodifikasi masa lalu agar dapat dijelaskan kembali untuk membangun harapan dan masa depan.⁵⁹

Tindakan untuk mengintegrasikan dan menceritakan pengalaman terkait peristiwa traumatis di masa lalu yang sangat sulit dipahami merupakan bentuk pembacaan kritis dan kebutuhan untuk membuat masa lalu dapat diceritakan. Terlibat dengan kenangan masa lalu yang menyakitkan dari berbagai kekerasan politik pada 1997-1998 di Jakarta, saya mengakui pentingnya pengamatan Tessa Morri Suzuki bahwa dorongan untuk menggunakan masa lalu melalui seni dapat membantu memahami masa kini dan merencanakan masa depan.⁶⁰

Menurut Purdey, kisah-kisah yang dialami oleh individu-individu dipengaruhi oleh ingatan traumatis pada kerusuhan Mei 1998 yang bersifat independen dan

⁵⁹ Mieke Bal, *Acts of Mmemory: Cultural Recall in the Present* (University Press of New England, 1999), 171.

⁶⁰ Tessa Morris Suzuki, *Tessa Morris-Suzuki. The Past Within Us: Media, Memory, History.*, vol. 111 (New York: Verso, 2005).

spesifik terutama pada cara mereka melestarikan trauma bersama.⁶¹ Oleh sebab itu, narasi mereka sendiri menghasilkan proses ingatan dan representasi lebih lanjut mengenai kekerasan politik yang belum terselesaikan di Indonesia. Dengan demikian, meluangkan waktu untuk menulis sejarah masyarakat menciptakan rasa tentang tempat dan waktu yang tidak menentu dan memberikan kita pegangan untuk menolak lupa (pencucian amnesia) pada berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Secara umum, berbagai peristiwa kekerasan politik yang terjadi pada 1997-1998 di Jakarta menunjukkan trauma individu dan sosial terhadap korban dan keluarga korban. Di sisi lain, ada beberapa bukti yang muncul bahwa individu dan komunitas cenderung secara efektif mengelola stres kekerasan politik. Misalnya membangun ketahanan individu dan sosial melalui jaringan layanan kesehatan, organisasi sosial, dan kegiatan yang berkaitan dengan memori kolektif tentang trauma kekerasan politik di masa lalu.⁶² Pada akhirnya, proses ini memicu munculnya upaya korban untuk mempertanyakan tatanan sosial yang ada melalui gerakan sosial.⁶³ Hubungan manusia tidak sempurna, namun membangun jaringan untuk membangun makna sosial melalui gerakan sosial sangat penting untuk melawan keinginan para pelaku untuk mengisolasi korban.

Dengan segala keterbatasan dan kondisi yang tidak menguntungkan para korban, keluarga korban dan komunitas yang ikut mendampinginya, mereka terus

⁶¹ Jemma Purdey, *The Other May Riots: Anti-Chinese Violence in Solo, May 1998, Violent Conflict in Indonesia* (Routledge, 2005), 84.

⁶² Cindy A Sousa et al., “Individual and Collective Dimensions of Resilience within Political Violence,” *Trauma, Violence, & Abuse* 14, no. 3 (2013): 245–246.

⁶³ Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 213.

berupaya menyuarakan penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Para korban masih terus menuntut dan berjuang dengan membentuk suatu gerakan yang terinspirasi dari gerakan yang dilakukan oleh sekelompok ibu yang kehilangan anaknya di Argentina, yang dikenal dengan “*Mothers of the Plaza de Mayo*. ”⁶⁴ Gerakan perlawanan yang secara konsisten menginspirasi munculnya berbagai gerakan untuk melawan kasus penghilangan paksa di segala penjuru dunia, khususnya di Jakarta. Dengan demikian, gerakan sosial berperan penting dalam mengidentifikasi cara-cara individu dan sosial membuat, membangun, dan mempertahankan koneksi tersebut dengan orang lain dan bekerja untuk menuju solusi.

D. Munculnya Gerakan Aksi Kamisan di Jakarta



Gambar. 1 Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta

⁶⁴ Zoila Clark, “The Mothers of the Plaza de Mayo: Trauma after the Disappearance of Their Children and the Trafficking of Their Grandchildren,” in *Ruptured Voices: Trauma and Recovery* (Brill, 2016), 14.

Aksi kamisan telah dilakukan sejak 18 Januari 2007 hingga sekarang (2024). Gerakan ini merupakan respons dari berbagai sejarah panjang kekerasan politik di Indonesia yang diwariskan oleh negara. Aksi kamisan terinspirasi dari gerakan ibu dan nenek yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah sipil di Argentina atas kehilangan anak, ayah, dan sanak keluarganya yang terjadi selama era Junta Militer Marcos. Aksi ini dikenal dengan gerakan “*Mothers of the Plaza de Mayo*” atau “*Plaza de Mayo*. ”⁶⁵

Dalam Aksi Kamisan, para korban, anggota keluarga korban, dan aktivis melakukan aksi damai di depan istana presiden di Jakarta, setiap hari kamis pukul 15:00-17:00.⁶⁶ Selama Aksi Kamisan berlangsung, terdapat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pertama, setiap peserta aksi berbaris dan berdiam diri menghadap istana negara selama satu jam, yang dimulai pada jam 15:00-16:00, dengan menggunakan payung yang bertuliskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu, membentangkan poster yang bertuliskan “tuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu” dan spanduk yang menampilkan wajah terduga pelaku pelanggaran HAM.

⁶⁵ Kontras, *Narasi Pembela HAM Berbasis Korban: Berjuang Dari Pinggiran* (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), 2019), <https://backup10juni.kontras.org/2019/07/25/narasi-pembela-ham-berbasis-korban-berjuang-dari-pinggiran/>.

⁶⁶ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.



Gambar. 2 Potret Peserta Aksi menghadap Istana Negara.

Kedua, pertunjukan seni dan refleksi. Pertunjukan seni biasanya dilakukan di saat-saat tertentu, misalnya pada perayaan Aksi Kamisan yang ke-17, menampilkan berbagai pertunjukan seperti musik, teater drama, dan pembacaan puisi oleh peserta aksi. Sedangkan, refleksi dilakukan setiap Aksi Kamisan dan disampaikan oleh pengajar, mahasiswa, pelajar maupun masyarakat sipil yang baru pertama kali mengikuti Aksi Kamisan. Pada gambar di bawah ini, terlihat Franz Magnis Suseno sedang menyampaikan refleksinya di hadapan peserta Aksi Kamisan.



Gambar. 3 Refleksi oleh Prof Franz Magniz Suseno

Peningkatan kesadaran kritis (*consciousness*) telah ditemukan sebagai komponen utama dalam Gerakan Aksi Kamisan sebagai transformasi individu dan sosial. Peningkatan kesadaran ini dapat dilihat dari upaya keluarga korban dan aktivis membentuk makna melalui refleksi dari berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu oleh negara. Dalam konteks terapeutik, kesadaran kritis dapat mewujudkan pemberdayaan pada individu dan mendukung keterhubungan sosial dan komunitas.⁶⁷ Oleh karena itu, refleksi mengenai peristiwa masa lalu ke dalam konteks sosial saat ini dapat menciptakan rasa agensi dan pemberdayaan bagi korban kekerasan negara pada 1997-1998 di Jakarta dan membentuk pemahaman pada masyarakat yang lebih luas terkait peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Gerakan sosial yang terfokus pada agensi bukan untuk menempatkan tanggung jawab semata-mata pada korban, melainkan untuk mencoba menyediakan ruang untuk membangun makna bersama, Mary Watkins menyebutnya sebagai “*homeplace*” atau tempat berkumpul di mana ruang terlindungi, sehingga dapat menciptakan kembali rasa kebersamaan.⁶⁸ Gagasan tentang “*homeplace*” atau tempat umum pertama kali digunakan untuk menggambarkan tempat berkumpul di ruang publik yang diproduksi oleh orang kulit hitam untuk menghadapi masalah humanisasi dengan membangun komunitas perlawanan.⁶⁹ Dalam Aksi Kamisan, ini dipahami sebagai ruang yang berkontribusi dalam membangun kesadaran kritis

⁶⁷ Martín-Baró, 120.

⁶⁸ Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 209.

⁶⁹ Bell Hooks, *Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics* (New York: Routledge, 2015), 48.

melalui situs perlawanan dan menjadi bagian penting dalam pembuatan makna kolektif oleh para korban pelanggaran HAM.

Peningkatan kesadaran melalui gerakan sosial dapat dikaitkan dengan pendekatan psikologi kritis terhadap trauma yang menggunakan pendidikan menuju transformasi. Pendekatan ini mengacu pada gagasan Freirean tentang kekuasaan yang berasal dari pengetahuan dan sentralitas pengetahuan masyarakat sebagai dasar untuk perubahan sosial.⁷⁰ Dengan demikian, merangkul pengetahuan berdasarkan pengalaman kehidupan nyata korban, lensa interpretatif muncul menuntut perubahan struktural. Sebagaimana Martin Baro menulis:

“Jalan paling signifikan untuk psikologi dalam pendidikan dan kesehatan mental adalah kesadaran (*consciousness*) atau proses menuju peningkatan kesadaran dalam pendidikan. Hal ini menyiratkan perubahan dalam fokus terapeutik dari keterasingan individu ke dealienasi kelompok melalui pemahaman kritis tentang realitas yang membentuk kehidupan masyarakat. Orang dapat memahami dan mengartikulasikan pengalaman mereka melalui pengajaran dialogis, reflektif, dan tindakan, yang kemudian dapat menyesuaikan renovasi pribadi dalam kehidupan mereka dan komunitasnya.”⁷¹

Menurut Hooks, gerakan sosial menawarkan kehangatan dan tempat berlindung, membentuk ketahanan individu, dan menciptakan pemulihan secara kolektif.⁷² Oleh karena itu, melalui gerakan sosial, individu dapat mengklaim integritas, martabat, pengakuan dan belajar memahami diri mereka setelah pengalaman yang menyakitkan. Definisi ini menggambarkan pengalaman saya selama berpartisipasi dalam Aksi Kamisan. Seperti terlihat pada gambar 4, saya

⁷⁰ Myles Horton and Paulo Freire, *We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change* (Philadelphia: Temple University Press, 1990), 62.

⁷¹ Martín-Baró, 27.

⁷² Hooks, *Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics*, 152.

mendokumentasikan interaksi antara ibu Sumarsih dengan seorang siswa SMA selama Aksi Kamisan berlangsung.



Gambar. 4 Ibu Sumarsih dan Pelajar dari Bandung di Aksi Kamisan

Jakarta

Dalam sesi refleksi, pelajar ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan kesan-kesannya mengikuti Aksi Kamisan. Dia mulai bercerita tentang ketertarikannya untuk belajar memahami tentang apa itu keadilan, apa yang diperjuangkan di Aksi Kamisan?, dan menyampaikan keyakinannya untuk mengambil peran di masa depan. Dia mengungkapkan: “sebagai seorang pemuda, saya yakin dan bisa untuk mengambil peran dari berbagai tantangan yang kita hadapi bersama saat ini” kemudian, ia menutup refleksinya dengan suatu kutipan *atmayora natusam* yang berarti kita terlahir untuk hal-hal yang besar.



Gambar. 6 Refleksi Seorang Pelajar dalam Aksi Kamisan di Jakarta

Pengalaman menjadi bagian dari gerakan sosial tampaknya dapat membantu untuk memelihara warga negara yang terpinggirkan akibat penindasan politik. Dalam artian, isolasi yang menyakitkan akibat kekerasan politik dapat dihilangkan dengan meratapi realitas ketidakadilan dengan peserta aksi yang berpikiran sama dan menyadari bahwa seseorang tidak sendirian dalam pengalaman mereka. Menurut Watkins dan Shulman, rumah-rumah umum menyediakan ruang untuk menumbuhkan kebersamaan dengan mendengarkan secara mendalam.⁷³ Dengan mendengarkan berbagai pengalaman pribadi penindasan sosial politik, masyarakat secara umum dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam (*conscientizacao*) ke trauma kolektif yang mempengaruhi semua orang di ruangan itu. Watkins mengatakan:

“Individu mulai melihat bahwa apa yang diderita bukan hanya miliknya sendiri. Melalui undangan aktif, potongan-potongan yang diketahui dan diingat setiap orang tentang situasi yang sedang dibahas ditempatkan berdampingan sampai gambaran yang lebih lengkap muncul. Dalam potret yang lebih rinci dari situasi bersama mereka, anggota mulai memahami dengan cara apa masalah pribadi mereka mencerminkan pengaturan sosiokultural yang lebih besar.”⁷⁴

⁷³ Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 210.

⁷⁴ Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 216.



Gambar. 7 Peserta Sedang Mendengarkan Refleksi

Refleksi juga disampaikan oleh Daniel, aktivis lingkungan yang baru saja dilaporkan karena kritiknya terhadap tambang udang yang dinilai merugikan masyarakat Karimunjawa (lihat **gambar 7**). Dalam sesi refleksi, Daniel bercerita tentang bagaimana kondisi yang dialami oleh masyarakat Karimunjawa dan para aktivis yang masih konsisten memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Terakhir, Daniel mengajak peserta aksi untuk tetap mengawal dan terus memperjuangkan keadilan masyarakat kecil. Setiap pembicara mengakhiri refleksinya, mereka menyerukan dan tanggapan seirama; hidup korban, jangan diam. Lawan, Jokowi, sudahi impunitas.



Gambar. 8 Daniel Menyampaikan Refleksi pada Aksi Kamisan Jakarta.

Ketiga, setelah semua peserta selesai menyampaikan refleksinya, para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu yang berjudul darah juang dan pasti menang yang dipandu oleh paduan suara Gitaku. Setelah semua lagu dinyanyikan, tahap akhir yaitu sesi foto bersama.

Dalam penelitian ini, tidak ada satu pun hasil yang dapat diprediksi dari inisiatif memori yang berupaya membawa fokus baru dalam peristiwa kekerasan politik yang terjadi pada 1997-1998 di Jakarta. Sebaliknya, yang ditekankan di sini adalah upaya korban dalam merawat ingatan kolektif, membangun solidaritas, dan kepedulian mengenai sejarah kekerasan politik di masa lalu. Mengingat dinamika kekerasan politik yang terjadi sepanjang 1997-1998 di Jakarta, kajian ini menekankan pada cara spesifik keluarga korban dalam membayangkan masa depan negara.

Tindakan kolektif, mobilisasi, dan tindakan aktivisme menunjukkan ekspresi dari jaringan ini, yang memproduksi dan menavigasi makna individu dan kolektif. Dengan kata lain, Gerakan Aksi Kamisan menjadi situs untuk mentransformasikan dan mempromosikan interaksi dari proses pembuatan makna secara kolektif berdasarkan pengalaman keluarga korban. Hubungan yang dihasilkan tersebut menjadi gudang kunci sejarah, identitas, dan bahkan kesejahteraan individu dan sosial. Oleh karena itu, suatu makna yang ditempa dan dinavigasi secara bersamaan di jejaring sosial yang terendam pada individu, mengarah pada pemeriksaan tentang bagaimana jaringan ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menangani trauma pasca kekerasan politik.

Gerakan Aksi Kamisan saat ini telah menyebar dari Jakarta ke 26 kota yang berada di Indonesia dan telah berlangsung di 36 kampus yang berbeda-beda. Selama bertahun-tahun, Aksi Kamisan telah menjadi ruang publik dan tempat lahirnya karya-karya kreatif baru seperti pertunjukan teater, komedi, musik, puisi, tarian, visual dan grafis, dan respons afektif terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, Aksi Kamisan telah mencakup suatu proses pembelajaran dan keterlibatan yang diwujudkan melalui interaksi dan dialog.

Menelusuri kemunculan situs publik yang bertujuan untuk mengenang kekerasan masa lalu memerlukan jawaban atas pertanyaan tentang kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana perhatian tersebut diarahkan pada warisan traumatis bangsa. Kerja lapangan fenomenologi dengan berpartisipasi secara aktif selama satu bulan dalam Gerakan Aksi Kamisan memberikan kesempatan untuk mengalami dan merasakan secara langsung, mendengarkan dan menyaksikan secara langsung berbagai lintas generasi yang berpartisipasi dalam Gerakan Aksi Kamisan.

Setiap Aksi Kamisan, para peserta aksi dapat menyampaikan refleksi yang dapat dipahami sebagai *storytelling*. *Storytelling* atau juga dapat disebut dengan teknik bercerita bersifat universal karena melampaui ras, agama, budaya, kelas sosial, dan generasi, yang memungkinkan untuk setiap orang dapat mengkomunikasikan perasaannya melalui cerita dan pengalamannya berpartisipasi dalam aksi kamisan. Inisiatif bercerita (refleksi) pada Aksi Kamisan merebut kembali seni yang hilang karena kemunculan komunikasi media elektronik. Oleh karena itu, dengan mengadakan ruang untuk berbagi cerita, individu dapat

membangun makna diri sebagai jalan untuk menciptakan kembali ikatan komunitas dan membentuk fondasi bagi perubahan sosial.

Terlepas dari tantangan dalam menciptakan ruang bagi jaringan kolektif untuk di tempa di Jakarta, temuan ini menunjukkan bahwa gerakan Aksi Kamisan yang berpusat di Jakarta telah menyebar luas ke seluruh wilayah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan Aksi Kamisan telah melibatkan kesadaran kritis setiap aktivis dan masyarakat umum untuk bekerja menuju transformasi negara yang berkemanusiaan. Dengan kata lain, kemungkinan bekerja dengan korban dan menempatkan pengalaman mereka dalam konteks struktural yang lebih besar dapat mendukung mereka menjadi agen perubahan sosial.

Pemahaman tentang kekerasan politik pada 1997-1998, dampak trauma psikologis terhadap individu dan sosial, dan pola perlawanannya dalam Gerakan Aksi Kamisan di Jakarta, meletakkan dasar untuk memahami gambaran besar mengenai pengalaman korban kekerasan negara. Kesadaran kritis, rasa agensi, solidaritas, dan kepedulian untuk membantu korban dan keluarga korban dalam memahami serta menyadari konteks sosial yang lebih luas sejalan dengan pandangan Kelly Oliver tentang sepertiga yang penuh kasih (*loving third*). Dalam artian, dukungan yang diperoleh individu melalui tempat umum (*homeplace*) dengan penuh kasih dapat menumbuhkan kembali makna positif pada individu dan sosial.⁷⁵

E. Kesimpulan

⁷⁵ Kelly Oliver and Steve Edwin, “Psychic Space and Social Melancholy,” in *Between the Psyche and the Social: Psychoanalytic Social Theory* (United States: Rowman & Littlefield Publishers, 2002), 54.

Pada bab ini, saya telah menyajikan proses substansi dari pembangunan bangsa yang sedang berlangsung yaitu upaya meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat maupun negara mengenai peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu. Serangkaian ide tentang identitas dan kebanggaan nasional yang dapat menyatukan masyarakat, menegaskan legitimasinya, dan menginspirasi pengorbanan demi kebaikan bersama. Meskipun begitu, hubungan negara dengan masyarakat ini seringkali dianggap remeh. Ketika gagasan tentang suatu negara menghasilkan kekerasan, marginalisasi, atau bahkan pengabaian hak asasi manusia, maka kekuatan nasionalisme yang dianggap remeh tadi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat pada negara. Atas nama bangsa, kita bergerak untuk melepaskan rasa kemanusiaan bersama. Sejarah dan ingatan kita tentang masa lalu yang penuh dengan kekerasan memberi tahu kita bagaimana bentuk-bentuk nasionalisme yang paling buruk dapat menimbulkan kejahanatan terhadap kemanusiaan, dan mewariskan trauma psikologis dari generasi ke generasi.

Dalam tarik-menarik ini, saya menemukan proyek memori sejarah dan ingatan traumatis yang belum terselesaikan pada bab ini. Situs publik dan praktik peringatan yang berupaya mengingatkan masyarakat akan konsekuensi buruk dari pengabaian hak asasi manusia dapat menciptakan kekerasan yang berulang-ulang dan mendorong munculnya gerakan perlawanan untuk menolak “budaya diam” melalui Aksi Kamisan. Oleh karena itu, dengan membahas masa kini, saya menyadari pentingnya negara dalam mempromosikan visi masa depan bangsa, yang didefinisikan oleh nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, dan keadilan. Terkesan idealis, namun dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang mengerikan, bangsa

yang terdiri dari berbagai ragam bahasa, budaya, dan agama yang dipandu oleh nilai-nilai luhur ini memang merupakan dunia yang layak untuk di perjuangkan. Sekarang saya beralih ke diskusi tentang bagaimana mengconceptualisasikan pengalaman korban dan keluarga korban pada bab tiga untuk meletakkan dasar dalam memahami bagaimana pertanyaan awal saya dibedah selama penelitian ini.



BAB III

PENGALAMAN KELUARGA KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU DAN MEMORI YANG HIDUP

“Duka cita saya bertransformasi menjadi cinta atas sesama.”

(Maria Catarina Sumarsih, Keluarga Korban Semanggi I)

A. Pengantar

Periode menjelang keruntuhan rezim Orde Baru di Indonesia ditandai dengan berbagai kekerasan politik di beberapa kota, terutama di Jakarta. Peristiwa penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998, peristiwa Trisakti dan pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan keturunan Tionghoa-Indonesia pada 12-15 Mei 1998, dan peristiwa tragis di masa transisi Orde Baru ke Reformasi yang dikenal dengan peristiwa Semanggi I (13 November 1998) dan Semanggi II (12 September 1999) di Jakarta. Serangkaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini belum terselesaikan hingga sekarang, sehingga menciptakan trauma kolektif terhadap individu dan sosial dalam jangka waktu yang panjang.

Bab ini menyajikan dimensi dan realitas yang paling menonjol terkait pengalaman dan aspek yang membentuk kehidupan keluarga korban pelanggaran HAM berat pada 1997-1998 di Jakarta. Meskipun cerita setiap orang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, ada banyak pola umum yang muncul dari pengalaman dan kehidupan yang saya temui. Pada beberapa bagian dalam bab ini, saya menyajikan tema naratif yang menggarisbawahi momen-momen penting dalam pengalaman hidup keluarga korban pelanggaran HAM berat 1997-1998 di Jakarta.

Tujuan dari bab ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana dan mengapa keluarga korban berusaha merawat ingatan traumatis tentang kekerasan politik 1997-1998 di Jakarta. Tema menyeluruh ini diilustrasikan dalam cerita peserta tentang periode sebelum kehilangan dan setelah kehilangan anggota keluarga mereka pada tragedi 1997-1998 di Jakarta. Apa yang sangat saya minati adalah mencoba memahami bagaimana keluarga korban menjalani kehidupan mereka sebelum peristiwa kehilangan dan apa yang membuat mereka mengambil sikap untuk merawat ingatan kekerasan di masa lalu.

Pertanyaan di atas diajukan dengan merujuk pada studi sebelumnya, terutama yang dilakukan Barbara Misztal tentang pentingnya narasi korban dan tindakan mengingat dalam kesehatan mental yang dapat menempatkan individu dalam proses pemulihan secara kolektif.¹ Dengan demikian, bab ini menyajikan temuan analisis narasi kritis dari hasil wawancara saya dengan keluarga korban. Saya akan memulai dengan memperkenalkan informan dan narasi yang dikumpulkan selama studi dan menyajikan tema yang muncul dalam penelitian ini.

B. Mengidentifikasi Narasi Keluarga Korban Tragedi 1997-1998 di Jakarta

Bagian ini menyajikan karakteristik profil utama dari peserta. Informasi ini dikumpulkan pada tahap kontak awal bersama peserta, tetapi dalam proses kemudian diklarifikasi lebih lanjut selama wawancara berlangsung. Adapun profil peserta mencakup dua keluarga korban pelanggaran HAM yang terjadi pada 1997-1998 di Jakarta, yaitu Maria Catarina Sumarsih dan Paian Siahaan. Maria Catarina Sumarsih saat ini telah berusia 72 tahun, dia merupakan ibu dari BR Norma

¹ Misztal, *Theories of Social Remembering*, 132.

Irmawan, mahasiswa Atma Jaya yang tertembak pada peristiwa Semanggi I dan Paian Siahaan seorang ayah yang berusia 77 tahun dan merupakan ayah dari Ucok Munandar Siahaan, Mahasiswa STIE Perbanas yang menjadi salah satu korban penghilangan paksa pada 1998 di Jakarta.

Bagian berikut fokus pada identifikasi tema utama dan sub-tema yang sesuai dengan pengalaman yang diceritakan peserta, tanpa kehilangan rasa narasi kohesif secara keseluruhan. Setelah analisis, tiga tema utama muncul sebagai perbedaan satu sama lain. Tema pertama yang muncul mengidentifikasi pengalaman para peserta sebelum peristiwa kekerasan politik 1997-1998 yaitu: pandangan dunia, nilai-nilai, dan juga pengaruh aktivitas politik sebelum peristiwa kekerasan. Selanjutnya, saya melanjutkan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengalaman mereka saat peristiwa tersebut terjadi, mengikuti alur narasi yang disampaikan peserta melalui pertanyaan terbuka. Akhirnya, saya fokus pada periode pasca peristiwa kekerasan politik 1997-1998 dan mengapa mereka memilih merawat ingatan traumatis pasca kehilangan.

1. Pengalaman Hidup Sebelum Kehilangan

Tema menyeluruh yang disajikan pada bagian ini berfokus pada cerita pengalaman peserta sebelum periode kekerasan 1997-1998 mencapai puncaknya di Jakarta. Saya mencoba memahami bagaimana para peserta mengalami kehidupan sebelum peristiwa 1997-1998 dan setelah peristiwa terjadi. Selain itu, alasan memilih tema kehidupan dan aktivitas adalah untuk mengilustrasikan transformasi kehidupan peserta dari fase sebelum kehilangan, saat, dan setelah kehilangan.

Semua peserta dalam penelitian ini menawarkan laporan yang kaya tentang kehidupan mereka dan kondisi yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan politik pada 1997-1998 di Jakarta. Subtema pertama menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga korban dan aktivitas yang memungkinkan para peserta membangun pengalaman yang bermakna dan sekaligus mengkhawatirkan, yang akan saya bahas secara rinci di bawah ini.

Subtema ini mengungkapkan berbagai pengalaman peserta terkait bagaimana mereka berpikir dan mengevaluasi pengalaman mereka sehari-hari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Dalam paragraf di bawah ini, Sumarsih menceritakan pengalamannya yang bahagia di tahun-tahun sebelum peristiwa tersebut.

“Sekitar tahun 98, saya merasa bahagia sekali. Saya kalau bersama teman-teman di jemputan itu, saya sering cerita mengenai anak-anak. Aku senang sekali, anakku sudah mahasiswa dua-duanya, tidak pernah terlibat tawuran dan tidak menggunakan narkoba. Saya sangat bahagia sekali. Saya pernah mengikuti *healing of memory* setelah kematian Wawan. Jadi program pemulihan yang diadakan *Transnasional Justice* dan Kontras. Di situ saya diberi waktu untuk menggambar tentang perjalanan kehidupan. Saya menggambarnya hanya datar terus, dan langsung turun kebawah. Setelah presentasi kelompok, saya bisa lepas menangis. Jadi, tahun 98 saya merasa di puncak kebahagiaan. Dalam diri saya, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh materi, tetapi situasi di rumah rukun, saling terbuka, tidak terlibat kejahanatan. Bagi saya itu cukup.”²

Sumarsih berbagi bagaimana dia merasakan dirinya sebagai ibu yang bahagia di masa itu dan mencoba memosisikan dirinya dengan menjelaskan nilai-nilai yang mendasari kebahagiaan dalam rumah tangganya. Berkumpul

² Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

dan bercerita tampaknya merupakan poin penting dalam menjaga kebahagiaan keluarganya:

“Kalau menurut saya, keluargaku sangat menyenangkan. Jadi kami saling percaya. Saya berusaha makan malam selalu bareng bersama keluarga, di meja makan kami saling berbagi cerita, yang di kampus ada apa, di kantor saya ada apa, yang di kantornya bapak wawan ada apa, waktu Irma masih SMA, juga bercerita di SMA ada apa, terus nanti berkembang berbicara masalah politik dan agenda reformasi. Oleh karena itu, saya tahu tentang agenda reformasi. Jadi kami berbicara tentang agenda reformasi, terus kenapa mahasiswa berdemonstrasi, itu kami diskusikan dan ditutup dengan besok mau dimasakin apa?”³

Bagi Sumarsih, komunikasi menawarkan kejelasan dalam hidupnya dan membuat peristiwa tak terduga memungkinkannya untuk lebih menerima apa yang tak dapat diubah. Lebih lanjut, Sumarsih membingkai narasinya tentang aktivitas dan tindakan intelektual putranya dalam konteks politik yang memanas di Indonesia saat itu. Saat dia melanjutkan untuk menguraikan titik-titik perlawanan yang dimiliki anaknya, dia dengan bangga menyebutkan beberapa karya yang ditulis anaknya. Dalam kutipan di bawah ini, Sumarsih menjelaskan:

“Setiap selesai makan, Wawan mengeluarkan komputer dari gudang dan melihat kembali tulisan-tulisannya yang banyak. Ada tulisannya yang berjudul DOM Aceh dan Negara Kesatuan Republik Alengka. Kemudian, di kantor saya itu perpustakaannya besar, dari buku-buku masalah politik sampai majalah perempuan itu ada. Jadi, ketika libur kuliah Wawan minta dipinjamkan buku, kalau tidak salah judulnya Mahabarata. Ketika dia selesai membaca buku itu, Wawan menulis artikel yang berjudul Negara Kesatuan Republik Alengka, cerita mengenai pemerintahan Soeharto.”⁴

Catatan Paian juga memberikan representasi yang kuat dari subtema ini:

“Kami seperti keluarga biasanya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga satu sama lain dan tidak ada masalah. Dalam artian, keluarga kami cukup harmonis. Bahkan sehari sebelum kehilangan Ucok,

³ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

⁴ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

dia mengabari kami dan berencana ke Bogor untuk merayakan ulang tahunnya dan akan memanggil teman-temannya ke rumah.”⁵

Sama halnya dengan Sumarsih, Paian menggambarkan bagaimana nilai-nilai keluarganya tercermin dari komunikasi yang baik dengan anaknya. Paian menggambarkan dirinya sebagai orang yang terbuka dan memiliki keluarga yang rukun dan harmonis. Menghubungkan sifat-sifat ini dengan asuhan dan nilai-nilai keluarganya, Paian memosisikan dirinya sebagai ayah yang memiliki komunikasi dan kedekatan pada anaknya, yang secara eksplisit menyatakan bahwa dasar-dasar inilah yang membuatnya menderita pasca kehilangan anaknya.

Secara kolektif, kedua peserta memosisikan diri mereka dan keluarganya terkait bagaimana kepercayaan, nilai, dan sikapnya dalam menggambarkan kehidupan keluarga mereka yang bahagia. Memiliki sistem kepercayaan yang kuat terhadap keluarga memfasilitasi penilaian positif terhadap kehidupan yang dapat dipahami dan bermakna. Setiap peserta mengacu pada pandangan moral tentang bagaimana keluarga yang baik dan bahagia sebagai nilai utama yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan keluarga.

2. Kekhawatiran

Pada bagian ini, saya menemukan aspek kerentanan pada keluarga korban pelanggaran HAM berat pada 1997-1998 di Jakarta. Pengalaman-pengalaman ini mencakup tema-tema yang paling menonjol seputar kekhawatiran yang

⁵ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

membentuk pengalaman pribadi keluarga korban di tengah kondisi politik yang memanas.

Sumarsih mulai menceritakan kembali ingatannya mengenai putranya yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Hubungan komunikasi dan interaksi dalam keluarga mereka telah membantu memberikan kepercayaan atas keterlibatannya dalam berbagai aktivitas di kampus. Sumarsih menguraikan beberapa situasi yang menggambarkan peristiwa tersebut:

“Jadi Wawan itu, semua organisasi di kampus dia ikuti. Wawan juga merupakan anggota jurnalis. Jadi, ketika dia hobinya membaca pasti bisa menulis. Dia juga suka menulis puisi, puisinya ada yang dimusikalisasi oleh Usman Hamid dari Amnesty International. Dari tulisan-tulisannya yang sekilas saya baca, ada yang berjudul DOM Aceh, itu menyebut nama syamsuddin dan Prabowo. Saya mengatakan pada Wawan agar saat menulis apalagi kalau mau dikirim ke media, jangan menyebut nama orangnya, pakai inisial saja.”⁶

Selama wawancara berlangsung, Sumarsih menguraikan aktivitas dan sikap politik Wawan dalam merespons berbagai isu-isu politik melalui tulisan-tulisannya. Narasinya berkonsentrasi pada kondisi politik yang memanas dengan sikap kehati-hatian memperingatkan anaknya agar tidak merinci penggunaan nama dalam setiap tulisannya. Kekhawatiran di tengah politik yang bergejolak diuraikan oleh Sumarsih, yang semakin jelas saat menjelang peristiwa paling tragis yang menimpa aktivis mahasiswa sejak keruntuhan rezim Suharto.

“Saya saat itu bekerja di DPR RI sebagai pegawai dalam Fraksi Golkar. Memang situasi sepanjang tahun 1996-1998 merupakan situasi politik yang memanas. Pada saat itu, di DPR sering ada di setiap lobi senjata yang di kokang keluar. Kemudian, kami di rumah sudah berjanji dan saling percaya. Wawan boleh pergi ke kampus saat sidang MPR RI, jadi Wawan tugasnya

⁶ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

mengurus logistik. Kalau Wawan di larang demo, dia akan mencari cara. Jadi biasanya Wawan mengadakan seminar.”⁷

Ketika dia terus menggambarkan situasi politik yang semakin menindas dengan menggambarkan kekhawatirannya, Sumarsih melanjutkan: “memang setiap hari di kantor saya itu dengar suara tembakan, entah tembakan peluru tajam, peluru karet, atau gas air mata setiap hari.”⁸ Nadanya menjadi semakin emosional ketika dia menggambarkan situasi yang mencekam, menunjukkan kekhawatiran pada anaknya, Wawan.

“Wawan itu waktu tahun 96, sudah kembali ke Jakarta, lulus SMA. Dan situasi politik di Jakarta sudah memanas. Kemudian saya melihat wawan itu, enam bulan pertama, dia sedang melihat situasi Jakarta.”⁹

Melihat kembali pengalaman ini, Sumarsih menafsirkan kondisi ini sebagai situasi yang mengerikan telah terjadi di Indonesia. Aktivitas putranya menjadi salah satu kekhawatiran yang muncul dalam periode kekerasan tersebut. Sumarsih bahkan tidak dapat mengungkapkan bagaimana kekerasan politik terus terjadi sepanjang tahun 1997-1998 dengan menggunakan frosa “melihat” yang ditujukan pada putranya sebagai ungkapan umum yang digunakan dalam mengamati sesuatu.

Berbeda halnya dengan Sumarsih, Paian mengungkapkan ketidaktahuan akan aktivitas anaknya di kampus. Apa yang dia ungkapkan sebelumnya, yang secara eksplisit merupakan kepercayaan diri terhadap anaknya dan mengakibatkan terhambatnya komunikasi yang lebih dalam dari interaksinya. Ini tampaknya merupakan hasil dari pembalikan nilai-nilai yang tidak masuk

⁷ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

⁸ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

⁹ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

akal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dan aktivitas anak di luar rumah.

Meskipun Paian menggunakan kata sifat “ketidaktahuan”, saya perhatikan bahwa nadanya emosional dan kecewa, yang membuatnya berpikir bahwa respons emosionalnya mungkin sulit untuk dipahami sebagai bentuk kekecewaan atas dirinya.

Ketika dia melanjutkan untuk berbicara tentang perasaan nyata yang dibawa oleh kenangan di masa sebelum kehilangan anaknya dan dampaknya terhadap pandangan dunianya, nada suara Paian menjadi lebih muram dan pesimis. Paian mengatakan

“Waktu itu, ia merupakan mahasiswa dari STIE Perbanas dan ia tidak ikut organisasi kampus. Namun, saya baru mengetahui setelah ia dinyatakan diculik, kalau dia ikut semacam gerakan bawah tanah. Kata temannya, Ucok digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan, karena saat itu banyak yang ditangkap seperti Budiman Sudjatmiko. Nah, mereka kan ditahan di Cipinang. Mungkin, salah seorang dari mereka yang dipakai sebagai kaki tangannya.”¹⁰

Sebelum hari penculikan dialami oleh putranya, dia bekerja sebagai pegawai kantoran yang terbiasa pulang malam. Dalam perjalanan pulang menuju rumahnya (beberapa hari sebelum kehilangan Ucok), Paian merasa diikuti oleh mobil yang tak dikenal hingga depan rumahnya. Menurut Paian, sebuah mobil benar-benar telah membuntutinya, saat Paian berupaya melaju dengan kecepatan tinggi, mobil tersebut terus mengikutinya dari belakang, begitupun saat Paian mengurangi kecepatan laju mobilnya, mereka selalu berada tepat dibelakang.

“Sebelum peristiwa penculikan dan penghilangan pada anak saya, mobil saya selalu dibuntuti oleh seseorang ketika pulang dari kantor dan bahkan

¹⁰ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

sampai di depan rumah. Saat saya berhenti di depan rumah, saya penasaran dan menghampirinya, tapi saat saya mendekatinya, ia langsung pergi.”¹¹

Paian berpikir bahwa kehilangan anaknya terkait erat dengan mobil yang pernah mengikutinya hingga depan rumah.

“Saat Ucok telah dinyatakan hilang, kami mulai paham kenapa mobil saya selalu dibuntuti oleh mobil itu, karena Ucok sering memakai mobil saya untuk pergi beraktivitas.”¹²

Akhirnya, pada hari teman Ucok menelepon untuk mengonfirmasi kepastian perayaan Ulang Tahun yang akan dilakukan di rumahnya, Paian menggambarkan dirinya dalam situasi yang bingung dan mengatakan Ucok belum kembali ke rumah. Namun, menurut kesaksian kawannya, Ucok telah kembali dan dijemput oleh seseorang dengan mobil.

Paian, seperti banyak orang lain, mengalami situasi yang membingungkan hingga menyakitkan untuk menerima kenyataan bahwa anaknya telah diculik dan belum kembali hingga saat ini. Dalam kehidupan keluarganya, dia menghadapi berbagai kesulitan psikologis dan menghambat kondisi ekonomi keluarganya. Tema berikut merangkum tanggapan keluarga korban terhadap pengalaman pribadinya saat peristiwa kehilangan dan konsekuensi yang dialami dari tindakan serta aktivitas politik yang mengancam.

C. Narasi Trauma

Narasi trauma muncul setelah peristiwa kekerasan yang menghancurkan rasa ketertiban dan cerita pribadi yang telah dibangun dalam kehidupan korban. Oleh karena itu, individu membutuhkan rasa kesinambungan dalam ruang dan waktu

¹¹ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

¹² Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

untuk mempertahankan citra diri yang berkelanjutan saat perubahan tersebut terjadi. Saya berupaya menguraikan dampak kekerasan politik yang terjadi sepanjang tahun 1997-1998 di Jakarta terhadap keluarga korban, sehingga deskripsi dan penjelasan yang difasilitasi oleh suara korban dapat dipahami dalam hubungannya dengan pemberdayaan pada korban melalui komunitas pada bab selanjutnya, sebagai logika cerita yang saling terhubung satu sama lain.

Menurut Hernandez, pemahaman yang mendalam dari narasi yang sistematik mengenai trauma perlu melibatkan tingkat narasi sosial politik dan individu.¹³ Mengingat dampak trauma pribadi yang terkait erat dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan, maka hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dalam konteks kekerasan politik dan dampaknya terhadap korban/keluarga korban di Jakarta. Dalam subkategori ini, saya memperoleh kesamaan narasi antarpeserta yang diwawancaraï sehubungan dengan perjalanan mereka melalui fase traumatis dan menyakitkan. Semua peserta menggambarkan ini sebagai transformasi kehidupan pribadi yang menyakitkan sekaligus mengubah cara pandang keluarga korban tentang kehidupan.

Semua mengakui sifat traumatis dari pengalaman mereka dan bagaimana hal itu membentuk identitas mereka selama dan setelah peristiwa traumatis tersebut. Mengenali dan mengakui krisis dan trauma yang terkait dengan kekerasan politik berfungsi sebagai titik awal untuk tumbuh dan mengkonfigurasi ulang makna bagi para peserta. Dengan menelusuri kembali perjalanan dan rasa sakit emosional yang

¹³ Pilar Hernández, “Trauma in War and Political Persecution: Expanding the Concept,” *American journal of orthopsychiatry* 72, no. 1 (2002): 16.

terkait dengan mereka, para peserta menarik kembali perspektif dan mampu menggambarkan antara lemparan eksistensial yang dibawa dalam konteks sosial-politik yang mereka tenggelamkan dan rasa identitas di antara para keluarga korban.

Paian memulai narasinya dengan berbagi pengalaman tentang kesulitannya saat dan setelah putranya dinyatakan hilang dan diculik oleh Tim Mawar, Paian berbagi pengalaman terkait bagaimana perasaannya saat itu:

“Kami merasa sangat kesulitan setelah kehilangan Ucok, apalagi ibunya terus sakit-sakitan. Kami terus mencarinya ke rumah keluarga, saudara, dan ke teman-temannya, tapi tak ada yang tahu keberadaan Ucok. Di sisi lain, kami kesulitan ekonomi, biaya yang kami keluarkan untuk mencarinya kemana-mana, ditambah lagi biaya pengobatan ibu Ucok yang terus sakit hingga ia meninggal pada tahun 2023 lalu.”¹⁴

Tidak hanya bagaimana dan apa yang individu pikirkan tentang diri mereka telah berubah, tetapi juga menggambarkan tentang dampak trauma pada kondisi kehidupan saat kehilangan. Paian menggunakan kata “kesulitan” untuk berupaya menguraikan dinamika psikologis yang mengakibatkan kesulitan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan Paian, Sumarsih menggambarkan pergeseran yang signifikan dalam dirinya terkait mati rasa secara emosional pasca kehilangan anaknya:

“Saya mati rasa, saya tidak bisa merasakan apa-apa, senang tidak mungkin, sedih, saya tidak merasakan sedih. Wawan meninggal hari jumat dan dimakamkan pada hari Sabtu. Setelah pulang dari makam, ada banyak wartawan, seperti dari *Kompas* dan lain-lainnya. Di rumah ada bapak Wawan, saya dan adiknya, Irma. Semuanya diam. Terus saya bilang begini, saya mau keluar kerja. Saya tidak sanggup bertemu dengan teman-teman.”¹⁵

¹⁴ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” Wawancara, 22 Juli 2024.

¹⁵ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

Seperti yang dicatat dalam bab 2, pengalaman trauma akibat kekerasan politik dapat menghancurkan pandangan dan asumsi hidup seseorang dan ini terbukti benar bagi mereka yang diwawancara. Perubahan dalam cara berpikir dan persepsi mereka tentang dunia setelah peristiwa kehilangan yang traumatis mengalami pergeseran dan ini membuatnya sulit untuk terhubung dengan orang lain.

Dalam kutipan di bawah ini, Sumarsih menguraikan perubahan hidupnya pasca kehilangan putranya pada 13 November 1998, terutama kesulitan untuk memahami pikiran dan perasaannya. Dia percaya telah kehilangan kebahagiaannya menjadi orang tua dini. Suasana hatinya yang bahagia digantikan dengan perasaan yang hampa. Selama wawancara dia menggunakan tangannya untuk menggambarkan siklus perjalanan kehidupannya:

“Saya pernah mengikuti *healing of memory*, semacam program pemulihan yang diadakan Transnasional Justice dan Kontras. Saat itu, saya disuruh menggambarkan tentang perjalanan kehidupan saya selama ini. Saya menggambarnya hanya datar terus dan langsung turun kebawah. Setelah presentasi di kelompok, saya bisa lepas menangis. Jadi, bagi saya tahun 98 merupakan puncak kebahagiaan. Dalam diri saya, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh materi, tetapi situasi di rumah rukun, saling terbuka, dan tidak terlibat kejahatan. Bagi saya itu cukup.”¹⁶

Kutipan Sumarsih mengacu pada perubahan hidupnya setelah kematian Wawan pada 13 November 1998. Selama menjelaskan perubahan hidupnya, Sumarsih menggambarkannya melalui gerakan tangan yang berupaya menjelaskan tingkat kebahagiaannya sebelum dan setelah kematian putranya.

Seperti halnya Sumarsih, Paian juga mengungkapkan dinamika psikologis dalam waktu yang panjang bersamaistrinya, menghadapi kenyataan anaknya yang

¹⁶ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

diculik pada 1998 dan belum kembali hingga sekarang, membuatnya kesulitan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

“Setelah kehilangannya, saya merasa bingung dan stress. Begitu juga dengan istri saya. Sejak kehilangan ucok, dia sering sakit-sakitan.”¹⁷

Paian berupaya menggambarkan pengalamannya menghadapi peristiwa kehilangan putranya melalui kata “kebingungan” dan “stress” yang digunakan untuk mengidentifikasi dirinya dengan dampak trauma yang dialaminya sebagai narasi traumatis yang kerap kali ditunjukkan korban pasca kehilangan.

Kedua peserta menguraikan pengalaman traumatis mereka yang mengarah pada mati rasa, rasa kelelahan, bingung, dan putus asa yang disebabkan oleh marginalisasi budaya terkait kekerasan politik di masa lalu. Temuan ini menunjukkan bahwa trauma dan kekerasan mengakibatkan mati rasa secara emosional sebagai trauma yang sulit. Mati rasa atau dalam istilah Judith Herman sebagai penyempitan yang dialami oleh korban karena menutupi diri secara emosional dan mental hingga merasa terlepas dari kenyataan.¹⁸ Saya merasa bahwa pengalaman wawancara dengan Sumarsih dan Paian cukup aman dalam konteks berbagi konten emosional yang menyakitkan. Oleh karena itu, perlu untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam terkait pengalaman mereka dalam proses pemulihan pasca kekerasan.

¹⁷ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

¹⁸ Judith Lewis Herman, “Complex PTSD: A Syndrome in Survivors of Prolonged and Repeated Trauma,” *Journal of Traumatic Stress* 5, no. 3 (1992): 45.

D. Proses Pemulihan Trauma Individu

Kedua narasi peserta menggambarkan tema yang muncul seputar dukungan dalam dimensi spiritual dan sosial dalam mengatasi pengalaman kehilangan traumatis. Meskipun peserta berbicara dan memahami strategi coping dengan cara mereka yang unik, tetapi semuanya mengacu pada peningkatan rasa penerimaan diri, ketahanan, dan pertumbuhan sebagai hasilnya. Kedua peserta menggambarkan rasa kebersamaan dengan orang lain yang sangat kuat dan merujuk pada peran penting perjalanan mereka melalui masa lalu yang menyakitkan. Subkategori ini muncul ketika kedua peserta mengungkapkan trauma mereka, dan hubungan mereka dengan orang lain menyebabkan perasaan lebih menerima nasib dan takdir mereka. Dalam laporan para peserta tentang penderitaan kolektif, tema kebutuhan akan interaksi dan dukungan sosial dan spiritual sering muncul yang juga memberikan kekuatan pada dirinya sebagai inti dari menemukan kembali rasa dirinya setelah pengalaman traumatis di masa lalu.

1. Dukungan Sosial

Solidaritas di antara para aktivis memberikan efek positif bagi keluarga korban untuk dapat berdiri bersama dengan lebih kuat dan berpegang pada keyakinan dan nilai-nilai mereka melalui cerita bersama. Oleh karena itu, penting bagi korban dalam menceritakan tidak hanya fakta sejarah melainkan juga emosi dan sensasi tubuh yang terkait dengan pengalaman traumatisnya. Mengingat bahwa narasi terperinci ini dapat membantu mengubah trauma dari serangkaian gambar yang terfragmentasi menjadi cerita koheren yang

mencakup respons emosional korban dan mengungkapkan makna yang mereka anggap sebagai peristiwa tersebut.¹⁹

Dalam catatan Sumarsih, pada 13 November 1998 merupakan peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya. Setelah menjemput tubuh anaknya yang telah kaku dengan luka bekas peluru tajam yang bersarang di dada sebelah kiri putranya, Sumarsih memakamkan putranya keesokan harinya di Taman Pemakaman Umum Joglo. Cara aktivis membantu keluarga korban begitu penting dalam menciptakan kembali semangatnya. Sumarsih mengatakan:

“Saya dibentuk oleh banyak orang, kenapa? Dulu saya kerja sebagai pegawai di DPR RI di Fraksi Golkar. Namun, setelah kematian Wawan, banyak wartawan yang datang ke rumah. Saya bilang, saya ingin berhenti bekerja. Saya bilang tidak sanggup bertemu dengan teman-teman. Akhirnya berita itu menyebar kemana-mana dan ada banyak yang memberikan nasihat, seperti anggota DPR, dia juga menasehati jangan keluar kerja, sekarang ini banyak PHK dan banyak yang gila. Terus, Wawan merupakan anggota Tim Relawan untuk kemanusiaan, sehingga banyak anak-anak dari tim relawan untuk kemanusiaan yang saya kagum, karena dia membangkitkan semangat saya. Ketika dia datang ke rumah, saya di bawa ke makam dan saya selalu diminta untuk bicara. Bicara apa saja. Kemudian yang datang ke rumah itu kadang-kadang sampai jam dua malam, belum pulang. Ada mahasiswa dari berbagai kampus, ada orang dari partai politik, ada aktivis. Mereka terus datang sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Saya masih sering didatangi oleh anak-anak mahasiswa sampai sekarang.”²⁰

Rasa interkoneksi yang kuat dengan orang lain dan keterbukaan diri yang diungkapkan dalam catatan Sumarsih muncul dengan latar belakang meningkatnya kekerasan politik yang tampaknya telah menerangi tujuan kolektifnya di kemudian hari. Pengalaman Sumarsih menunjukkan prosesnya

¹⁹ Judith Herman, “Remembrance and Mourning,” in *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence* (Hachette UK, 1992), 176–177.

²⁰ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

menemukan diri melalui interaksi dengan orang lain pasca kehilangan yang berdampak secara keseluruhan pada kehidupannya.

Kata-kata Sumarsih dengan jelas menunjukkan transformasi dirinya setelah pengalaman traumatis yang menyakitkan. Rasa penghargaan Sumarsih yang mendalam atas dedikasi putranya dan kemampuannya untuk mengadvokasi kasus Semanggi I dan II, tumbuh saat mengingat tindakan yang telah berupaya dilakukan putranya selama dia hidup. Setelah pengalaman kehilangan traumatis, Sumarsih berupaya memperlihatkan perubahan dalam cara berpikir dan bagaimana ia hidup dengan pengalaman tersebut dan mulai mengidentifikasi dirinya sebagai korban kejahatan negara.

Demikian pula, bagi Paian, perjuangan untuk melewati rasa sakit yang menyakitkan pasca penculikan putranya memiliki implikasi yang signifikan pada hidupnya pasca kehilangan karena ia menarik perhatiannya dalam mengadvokasi organisasi keluarga korban penghilangan paksa melalui Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) yang kemudian digantikan oleh Mugiyanto Sipin (penyintas dalam peristiwa penculikan pada 1997-1998 di Jakarta). Bagi Paian, perjuangan akan terus dilakukan hanya jika keadilan dan kepastian hukum atas putranya yang dihilangkan dapat dipertanggung jawabkan oleh negara.

“Saya sendiri tidak pernah mengikuti program pemulihan tapi istri saya pernah mengikutinya. Program itu dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tapi, istri saya sudah meninggal pada tanggal 3 Februari 2023. Namun untuk saya pribadi, banyak orang yang membantu.”²¹

²¹ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

2. Dukungan Spiritual

Menurut Kucharska, dukungan spiritual dapat membantu meredam trauma pada korban kekerasan dan menyediakan sumber kenyamanan selama masa-masa yang sulit.²² Mengingat dampak trauma yang menciptakan kehancuran pada identitas individu, maka kebutuhan untuk menemukan kembali makna melalui penyelerasian peristiwa traumatis dengan keyakinan begitu penting. Sumarsih membagikan perjalannya dalam mengidentifikasi rasa diri dan makna kematian yang dialami oleh putranya, Wawan.

“Saya agamanya katolik. Saya katolik menjelang nikah, jadi saya tidak tahu, katolik itu seperti apa. Oleh karena itu, anak-anak saya sekolahkan di katolik, supaya saya bisa belajar beragama katolik. Saya merasa bahwa Tuhan Yesus Maria yang membentuk saya melalui doa dengan pasrah. Penembakan wawan itu kan diluar kemampuan yang saya hadapi, dan itu tidak direncanakan. Datang dalam sesaat.”²³

Kata-kata Sumarsih mencerminkan pengalaman spiritual yang membantu dirinya memahami peristiwa tragis di masa lalu dengan menggunakan prosa “doa” dan “pasrah.” Sumarsih berupaya menggambarkan keterhubungan dirinya melalui doa dengan penerimaan atas takdir yang telah ditentukan dalam hidupnya. Menurut Euniel David Cho, ritual seperti doa dapat memberikan korban keyakinan, makna, dan pemulihan yang berkontribusi dalam membantu mereka mengatasi pengalaman trauma dan memfasilitasi makna baru dalam

²² Justyna Kucharska, “Religiosity and the Psychological Outcomes of Trauma: A Systematic Review of Quantitative Studies,” *Journal of Clinical Psychology* 76, no. 1 (2020): 47.

²³ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

menceritakan kembali narasi mereka sebagai langkah penting menuju pemulihan dan penyembuhan.²⁴

Sumarsih menggambarkan bagaimana dukungan organisasi hak asasi manusia dalam menyediakan dukungan pemulihan secara emosional dan spiritual terhadap keluarga korban sangat berperan penting dalam pertumbuhan pribadi individu pasca kehilangan traumatis.

“Ketika Kontras mengadakan acara pemulihan (Yayasan pulih), kami diundang ke kantor yayasan pulih. Kemudian, pernah Komnas Perempuan itu juga mengadakan acara pemulihan, saya juga diundang dan pernah dibawa ke bali sama *Transnasional Justice*. Terus ketebulan di Gereja saya itu ada pastur baru mengadakan seminar “*healing of memory*” pasturnya baik sekali. Dia sering bertanya bagaimana dalam keseharian? Yah, hidup ini seperti air mengalir. Kita ikutin saja arah air itu mengalir. Akhirnya, pada saat saya mengikuti penyembuhan luka batin di gereja, saya berserah diri sampai sekarang. Jadi yang membentuk saya itu, banyak orang.”²⁵

Pernyataan Sumarsih di atas menunjukkan peran penting dukungan sosial dan spiritual dalam membangun kehidupan yang bermakna menuju kesadaran yang menciptakan rasa diri bagi korban. Lebih lanjut, Sumarsih menguraikan pandangan hidupnya dalam memahami kematian putranya, Wawan. Sumarsih mengatakan:

“Saya selalu bilang, hidup itu seperti air mengalir. Saya menganggap Wawan itu hanya pindah tempat. Orang meninggal itu hanya pindah tempat, dulu di dunia sekarang dia di akhirat. Jadi, saya selalu bersuka cita bersama wawan dalam hati saya. Kalau misalnya saya kangen, saya cuman menyebut namanya; ah wawan, ah wawan, sudah begitu.”²⁶

²⁴ Eunil David Cho, “Migration, Trauma, and Spirituality: Intercultural, Collective, and Contextual Understanding and Treatment of Trauma for Displaced Communities,” *Pastoral Psychology* 72, no. 3 (2023): 411–412.

²⁵ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

²⁶ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

Sumarsih menggambarkan peran penting yang mendukung dirinya bangkit dari pengalaman traumatis dalam proses katarsis yang mendalam, tindakan transendensi spiritual dan komunikasi. Dalam kutipan Sumarsih, ia menawarkan deskripsi terperinci tentang “air yang mengalir” dan upayanya dalam memahami kehidupan melalui peristiwa yang menimpa diri dan putranya. Saat dia mulai menceritakan pengalamannya, nada Sumarih menjadi sangat senang. Saya perhatikan wajahnya tersenyum sepanjang wawancara berlangsung dan postur tubuhnya menjadi lebih lurus, saat dia meletakkan kedua tangannya di dadanya. Dalam catatan Sumarsih, saya merujuk pada fakta bahwa seolah-olah saat dia menyebut nama Wawan, dia secara bersamaan telah merasakan keberadaan Wawan dan terhubung secara mendalam.

Hubungan dialektis diri dengan konteks spiritual dan sosial jelas terlihat melalui transformasi ini, terutama pada bagaimana korban individu berpikir tentang diri mereka dan apa yang mereka lakukan berubah. Kehilangan traumatis dan dukungan itu (spiritual dan sosial) pada gilirannya memberikan keluarga korban kesempatan untuk mengidentifikasi diri secara mendalam.

“Saya dibantu banyak orang, terutama di Gereja. Kami sudah pasrah, tidak bisa lagi terlalu berharap mereka akan kembali dengan kondisi hidup. Kami hanya ingin agar status hukum anak kami, Ucok Munandar Siahaan, yang hilang menjadi jelas. Kami hanya ingin status mereka jelas.”²⁷

Paian menggunakan metafora “pasrah” sebagai istilah umum untuk menggambarkan hati yang tabah dalam menerima takdir yang dialaminya. Pengalaman memelihara hubungan dengan orang lain terutama hubungan

²⁷ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

spiritual tampaknya telah membuat rasa sakit lebih tertahan dan bermakna.

Paian berupaya bergerak melampaui rasa sakitnya dan meningkatkan rasa penerimaan diri terhadap takdir, memperoleh kembali rasa kebersamaan dan kebebasan yang tinggi untuk memperjuangkan keadilan secara kolektif.

Rasa penerimaan diri, identitas, dan subjektivitas dari kedua peserta mencerminkan bagaimana perjalanan pemulihan dari kehilangan traumatis pasca kekerasan melalui dukungan sosial dan spiritual mendukung mereka bangkit dan mengembalikan rasa kebersamaan. Pada saat yang sama, hal itu mengubah rasa sakit menjadi lebih bermakna dengan tindakan dan kewajiban untuk menceritakan pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Pada akhirnya, dukungan yang diperoleh dari korban menjadi titik awal yang memenuhi kebutuhan untuk melestarikan memori sejarah. Dengan merawat ingatan mengenai kekerasan di masa lalu dan secara terbuka mengecam kekerasan negara, korban dapat memahami sistem dan struktur politik yang menindas.

E. Membangun Situs Publik Pasca Kekerasan

Pengalaman korban dalam menghadapi peristiwa traumatis di masa lalu dan proses pemulihan trauma mereka menunjukkan pentingnya dukungan sosial dan spiritual bagi kehidupan korban. Penerimaan diri, identitas diri, dan munculnya rasa agensi di kalangan korban mendorong upaya mereka untuk membangun kembali rasa komunalitas dan kebersamaan yang rusak akibat kekerasan melalui situs publik (*homeplace*).

Bagi korban, dukungan yang diperoleh dari organisasi atau komunitas hak asasi manusia dan para aktivis lainnya, berperan penting dalam membantu

mengkomunikasikan pengalaman mereka secara luas. Sumarsih menggambarkan peran dukungan para aktivis yang membantu dirinya bangkit dari membangun masa yang sulit. Sumarsih mengatakan:

“Hal ini berkat bantuan teman-teman hingga akhirnya saya bisa mempunyai niat untuk mengadvokasi penembakan wawan dan kawan-kawannya. Apa targetnya? Saya merasa berhasil kalau peristiwa penembakan terhadap mahasiswa dalam peristiwa semanggi I dan II dan peristiwa trisakti berhasil di bawa ke pengadilan HAM *adhoc*. Perjuangan ini untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan konstitusi.”²⁸

Dalam proses perkembangannya, Sumarsih bersama Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) dan keluarga korban lainnya membentuk suatu komunitas yang dinamai paguyuban. Suatu komunitas yang bergerak dalam mengadvokasi peristiwa 13 Mei 1998, Semanggi I dan Semanggi II. Sumarsih mengungkapkan:

“Awalnya, saya membentuk paguyuban tragedi berdarah 13 Mei 1998, semanggi I dan Semanggi II, 24 september 1999 dengan tim relawan untuk kemanusiaan. Akan tetapi sulitnya bukan main, banyak yang lelah dan akhirnya bubar. Setelah kemudian bubar, tahun 2004 saya mendapat *piam award* dan mendapat uang tapi saya bilang uangnya untuk apa? Akhirnya, waktu itu saya bilang pada Romo Santiaga, kalau nanti ada nilai tunainya, sebaiknya digunakan untuk kegiatan apa? Akhirnya membentuk JSKK (Jaringan Solidaritas korban Untuk keadilan). JSKK itu dulunya ada yang pengen bubarin, IKOHI itu kan organisasi korban. Jadi sudah ada organisasi korban, kenapa kita membuat organisasi korban yang baru. Akhirnya ada yang setuju bubar dan ada yang bertahan. Menurut saya, bubar atau tidak bubar, biar alami saja. Dalam sebuah rapat JSKK, saya bilang kalau kita buat buku terus, kita sosialisasikan ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, lalu kapan advokasinya? Bagaimana kalau kita mengadakan aksi rutin. Terserah mau sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan dua kali. Kemudian kita rencanakan dan jadilah tanggal 18 Januari 2007, kami mulai aksi yang pertama.”²⁹

Meskipun, upaya Sumarsih dan keluarga korban lainnya sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tetapi harapan dan keyakinan untuk terus

²⁸ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

²⁹ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

memperjuangkan keadilan pada putra mereka menggambarkan rasa agensi dan kewajiban pasca peristiwa yang menyakitkan. Sumarsih mengidentifikasi tindakannya sebagai wujud perjuangan dan perlawanan atas putranya yang meninggal dan bukan sebagai tindakan dendam.

“Kami mau dendam sama siapa? Mau marah pada siapa? Kami tidak tahu siapa yang menembak Wawan dan kawan-kawannya. Kami hanya butuh keadilan. Anak kami ditembak oleh peluru tajam aparat keamanan, membunuh kan di larang, dilarang oleh Tuhan dan dilarang oleh konstitusi.”³⁰

Terlepas dari berbagai tantangan, kesulitan, dan stigma yang menyelimutinya, Sumarsih membangun diri dengan berani merangkul penderitaannya melewati masa sulit dan menyakitkan, serta bersama membangun makna melalui tempat tinggal bersama (*homeplace*) yang disebut Aksi Kamisan. Menurut Barnett, ketabahan yang luar biasa dari penderitaan memiliki potensi untuk menjadi faktor yang membantu pertumbuhan, menjadi sumber kekuatan dan makna, dan memperluas rasa kebebasan seseorang.³¹ Dengan berbagai pengalaman traumatis yang tidak manusiawi dan dampak terhadap rasa kepribadian, ikatan sosial, dan nilai-nilai mereka, semua peserta tampaknya telah mengintegrasikan dan melampaui rasa sakit dan isolasi melalui berbagai proses pembuatan makna yang berkelanjutan yang berakar kuat pada tindakan setelah peristiwa traumatis.

F. Ringkasan Temuan, Diskusi dan Implikasinya

Bab ini mengeksplorasi bagaimana pengalaman keluarga korban kekerasan politik 1997-1998 di Jakarta dan mengapa mereka memilih untuk mengingat

³⁰ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

³¹ Oana Barnett, “An Existential Phenomenological Exploration of the Lived Experience of Freedom in Former Political Prisoners of the Romanian Communist Gulag” (Dissertation, Middlesex University, 2021), 159.

peristiwa traumatis di masa lalu. Kedua peserta menguraikan pengalaman mereka yang menggambarkan tiga momen penting yaitu, sebelum (*Before the Loss*), saat kehilangan (*The Loss*), dan tindakan mereka setelah peristiwa kehilangan (*After the Loss*). Berdasarkan pengalaman kedua peserta, kisah mengenai peristiwa sebelum kehilangan traumatis berhubungan erat dengan narasi mereka terkait pengalaman hidup dan aktivitas keluarga korban dalam situasi politik yang memanas pada 1997-1998 di Jakarta. Misalnya, latar belakang aktivitas putra mereka dalam merespons isu politik menghantarkan pemahaman yang saling terkait dengan peristiwa penculikan dan penghilangan paksa yang dialami oleh putra Paian Siahaan pada 13 Mei 1998 dan kasus penembakan terhadap sejumlah mahasiswa Universitas Atma Jaya pada 13 November 1998 di Jakarta, yang salah satunya merupakan putra dari Maria Catarina Sumarsih.

Studi ini juga menemukan bahwa kekerasan politik mengakibatkan trauma psikologis pada keluarga korban yang meliputi pengalaman dan perasaan mereka saat kehilangan (*the loss*) seperti, mati rasa, stress, sedih, dan bingung sebagai ungkapan yang sering kali dialami oleh individu yang terdampak trauma kekerasan. Selama masa-masa yang sulit, keluarga korban juga membagi pengalaman mereka tentang momen-momen penting yang berkontribusi dalam mendukung dirinya bangkit melalui fase traumatis mereka seperti, dukungan sosial dan dukungan spiritual. Di satu sisi, keluarga korban mulai mempertanyakan alasan kematian putranya di tangan aparat keamanan, yang menyiratkan kebutuhan untuk memenuhi pemulihan mereka. Oleh karena itu, kebutuhan inilah yang melatarbelakangi tindakan keluarga korban dalam membangun situs publik sebagai ruang yang dapat

menciptakan pertemuan antara keluarga korban dan para aktivis untuk merawat ingatan tentang kekerasan di masa lalu. Seperti yang disajikan dalam bab ini, dalam konteks kekerasan dan trauma, kedua peserta umumnya menunjukkan aspek yang terjalin kuat dengan konteks penyembuhan dan pemulihan, serta tindakan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Temuan ini memperdalam topik yang saya amati tentang tindakan untuk merawat ingatan pasca kekerasan politik yang menunjukkan hubungan terapeutik dengan pengalaman korban membangun komunitas perlawanan. Selama masa sulit, mereka tetap berupaya mengikuti alur kehidupan yang menyakitkan, kemudian memperoleh dukungan dan kenyamanan satu sama lain, merawat ingatan putranya tetap terjaga dan tetap dekat dengan hati mereka. Selain itu, kedua peserta menguraikan pengalaman mereka dalam membangun kembali dunia relasional dengan mengkomunikasikan kembali ingatan tentang pengalaman dan perasaan mereka di masa lalu.

Menurut Judith Herman, ingatan dan berkabung (*remembrance and mourning*) merupakan proses pengintegrasian narasi trauma ke dalam konteks hidup seorang penyintas yang memungkinkan mereka menciptakan kembali narasi trauma dan sekaligus melepaskan gairah otonom dan ketakutan.³² Oleh karena itu, penyintas dapat menjadi lebih percaya dengan dirinya sendiri dan meningkatkan rasa amannya di dunia. Pada saat yang sama, menurut Siegel bahwa meski klien telah

³² Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-from Domestic Abuse to Political Terror*, 175.

merasa aman setelah stabilisasi, namun sampai memori dimetabolisme, klien akan tetap dalam kekacauan saraf (*unassembled neural disarray*).³³

Studi ini juga berkontribusi secara teoritis mengenai tubuh dan pikiran terutama pada bagaimana pengalaman traumatis menampakkan dirinya melalui ingatan publik. Menurut Ann Pederson dkk, ingatan kita berada dalam lingkungan ekologis.³⁴ Artinya, ingatan individu terkait dengan cara fisik menerima dan menafsirkan dunia. Pada saat yang sama, melihat dan menafsirkan dunia adalah tindakan hermeneutis dari tubuh manusia. Oleh karena itu, tempat atau ruang publik berperan penting dalam menciptakan interaksi secara dialogis dengan konteks sosial yang lebih luas. Artinya, dengan memproses ingatan secara kolektif, individu dimungkinkan memperoleh pengetahuan dan kesadaran kritis yang berkaitan dengan pengalaman hidup yang menyakitkan di masa lalu.

Kesadaran kritis tentang peristiwa traumatis yang disebabkan oleh manusia dan menciptakan rasa takut yang diketahui, dapat membuat keputusan yang terdidik pada bagaimana bereaksi terhadap rangsangan tertentu. Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa perubahan epigenetik yang terjadi pada tubuh manusia yang mengalami trauma merupakan bagian besar dari dunia yang tidak selalu dapat diproduksi secara internal dalam kesadaran tetapi mereka selalu diwujudkan dalam ingatan. Bourdieu menyebutnya sebagai “tubuh yang diinformasikan secara

³³ Daniel J Siegel, *Mindsight: The New Science of Personal Transformation* (Bantam, 2010), 154.

³⁴ Ann Pederson et al., “Remembrance and Resilience: How the Bodyself Responds to Trauma,” *Journal of Religion & Science* 53, no. 4 (2018): 1204.

sosial.”³⁵ Mengingat bahwa trauma diciptakan dalam konteks suatu hubungan, sehingga harus disembuhkan dalam suatu hubungan pula.

Studi ini juga menunjukkan bahwa kerusakan yang dilakukan pada seseorang oleh orang lain, seperti peristiwa yang dialami oleh Sumarsih dan Paian, membutuhkan interaksi penyembuhan timbal balik dalam hubungan lain, hal yang sama dalam konteks terapis. Ini merupakan sifat penyembuhan dari hubungan terapeutik yang melibatkan kembali penyintas dengan masyarakat dan menumbuhkan kembali kepercayaan mereka tanpa ada rasa takut.³⁶ Pada saat yang sama, pengorganisasian diri juga dapat menciptakan (atau merebut) kembali rasa diri setelah peristiwa traumatis.³⁷ Dengan demikian, proses yang saling terkait dalam temuan penelitian ini dapat dipahami sebagai tahapan pemulihan yang memungkinkan adanya pengorganisasian diri untuk mengembalikan aliran kesadaran menuju keseimbangan.

G. Kesimpulan

Hasil ini menyoroti bahwa merawat ingatan bersinggungan dengan proses pemulihan trauma yang menantang bagi para penyintas. Bagaimana pun, para terapis trauma menggambarkan fase ini sebagai fase yang sulit untuk membantu klien terlibat, terutama pada mereka yang mengalami gejala penghindaran trauma. Oleh karena itu, momen penting ini membutuhkan klarifikasi dan pekerjaan lebih lanjut di masa depan. Dengan demikian, pertimbangan untuk mempelajari

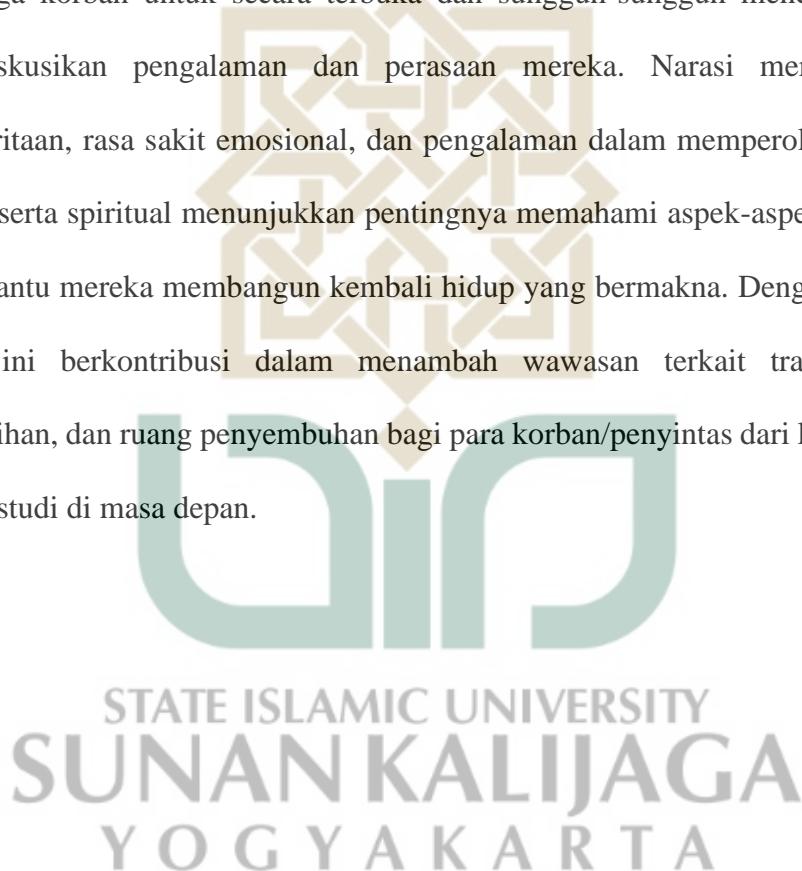
³⁵ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Routledge, 2020), 124.

³⁶ Martín-Baró, 120–121.

³⁷ Daniel J Siegel, *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are* (Guilford Publications, 2020).

bagaimana dan mengapa korban kekerasan negara menolak untuk merawat ingatan dan terlibat dalam komunitas perlawanan dapat terus mengungkap apa arti narasi korban/penyintas dalam konteks memori kolektif.

Terlepas dari aspek tersebut, dengan memperhatikan kembali temuan di atas, saya menemukan kelompok fokus yang sangat produktif dalam mendorong keluarga korban untuk secara terbuka dan sungguh-sungguh menceritakan dan mendiskusikan pengalaman dan perasaan mereka. Narasi mereka tentang penderitaan, rasa sakit emosional, dan pengalaman dalam memperoleh dukungan sosial serta spiritual menunjukkan pentingnya memahami aspek-aspek yang dapat membantu mereka membangun kembali hidup yang bermakna. Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam menambah wawasan terkait trauma, proses pemulihan, dan ruang penyembuhan bagi para korban/penyintas dari lintas konteks untuk studi di masa depan.



BAB IV

GERAKAN AKSI KAMISAN: MAKNA INGATAN DAN PEMULIHAN KOLEKTIF

“Trauma bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang kita simpan dalam hati karena tidak adanya saksi yang berempati”

(Peter A. Levine, In an Unspoken Voice).

A. Pengantar

Setelah mengetahui pengalaman keluarga korban dalam menghadapi peristiwa traumatis yang sehubungan dengan kehilangan putra mereka, sekarang saya beralih ke bagaimana tindakan yang diambil korban melalui Aksi Kamisan mempengaruhi proses pemulihan mereka. Proses pemulihan yang bersifat partisipatoris, kolaboratif dan non-direktif ini dilakukan untuk mengembangkan kesadaran kritis, pemberdayaan, kekuatan budaya dengan menekankan pentingnya aksi sosial dan politik sebagai jalan menuju kesejahteraan.¹ Ketiga ciri tersebut merupakan aspek penting untuk menyadari kekuatan sosial, politik yang patologis, menentang *status quo* yang menindas, dan membantu mengubah ketidakberdayaan menjadi agensi, meningkatkan efikasi diri, harga diri, dan berfungsi untuk menegaskan kembali martabat manusia.

Kedua keluarga korban yang diwawancara berbicara tentang bagaimana tindakan yang mereka pilih melalui komunitas menciptakan rasa kebersamaan dan dorongan untuk bangkit kembali. Mereka berulangkali mengatakan bahwa tindakan kolektif dalam Aksi Kamisan mewakili ruang untuk berbagi, bercerita,

¹ Paulo Freire, “Pedagogy of the Oppressed (MB Ramos, Trans.),” New York: Continuum 2007 (1970): 81.

dan berjuang bersama. Rasa kebersamaan ini berasal dari keberadaan fisik orang lain di tempat yang rutin dilakukan setiap hari kamis di depan istana negara, berbagi pengalaman penindasan dan kehilangan traumatis bersama. Berdiri dan berkumpul bersama dengan orang lain memberi mereka dukungan dan kekuatan. Aksi Kamisan juga dipandang sebagai ruang kolektif untuk merawat ingatan tentang kekerasan negara di masa lalu yang dipertahankan, diakui, dan disatukan bagi mereka yang diwawancara. Perasaan menjadi bagian dari satu gerakan ini memberi korban rasa kebersamaan yang mendalam yang tidak ia rasakan ketika terlibat dalam tindakan individu.

Menurut Bell Hooks, situs-situs perlawanan dapat memberikan peluang penyembuhan komunitas yang luar biasa dengan menciptakan rasa aman, koneksi, dan kebersamaan.² Oleh karena itu, gerakan seperti Aksi Kamisan memiliki kemungkinan untuk mewakili ruang pemulihan secara kolektif, menghadirkan kembali makna, identitas dan solidaritas dalam komunitas. Situs perlawanan atau tempat tinggal yang menyediakan ruang untuk mendengar secara mendalam, berbagi pengalaman pribadi penindasan politik memberikan wawasan dan kesadaran kritis pada orang lain. Mary Watkins dan Helene Shulman mengatakan:

“Individu mulai melihat bahwa apa yang diderita bukan hanya milik sendiri. Melalui undangan aktif, potongan-potongan yang diketahui dan diingat setiap orang tentang situasi yang sedang dibahas ditempatkan berdampingan sampai gambaran yang lebih lengkap muncul. Dalam potret yang lebih rinci dari situasi bersama mereka, anggota mulai memahami dengan cara apa masalah pribadi mereka mencerminkan pengaturan sosiokultural yang lebih besar.”³

² Hooks, *Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics*, 41–42.

³ Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 216.

Kehendak untuk mengidentifikasi diri sebagai korban kejahatan negara berarti menghubungkan seseorang ke dalam konteks sosial yang lebih luas dengan tuntutan yang sama dari negara. Pada saat yang sama, identifikasi nasional pada tingkat organisasi dapat menjadi alternatif dalam mengatasi trauma sosial akibat kekerasan. Dengan demikian, hubungan individu ke dalam jaringan tuntutan negara dapat menjadi strategi tindakan untuk menumbuhkan rasa memiliki, yang secara teoritis merupakan cara untuk mengurangi efek kekerasan yang dialami atau dirasakan.

Untuk menjelaskan fenomena ini lebih lanjut, tulisan ini akan memulai dengan pertanyaan penting tentang apa makna dari tindakan keluarga korban dalam membentuk Aksi Kamisan? Dan sejauh mana Aksi Kamisan mempengaruhi kehidupan keluarga korban pasca peristiwa traumatis. Dalam menjawab beberapa pertanyaan utama ini, saya menggunakan pendekatan psikologi pembebasan. Dalam teori psikologi pembebasan, tekanan psikologis dapat diakibatkan oleh ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, dan sejarah, dan bahwa perawatan kesehatan mental perlu mempertimbangkan dan mengatasi konteks tersebut melalui tempat tinggal (*homeplace*), kesadaran kritis (*counsiuosness*), dan pemulihan kolektif. Maka, dengan pendekatan ini diharapkan fenomena Aksi Kamisan dapat dipahami lebih mendalam dan komprehensif.

B. Gerakan Aksi Kamisan: Makna Ingatan dan Pemulihan Kolektif

Subtema ini muncul ketika para peserta mengungkapkan kekuatan trauma yang melampaui individu menjadi kolektif dan bagaimana hubungan mereka dengan orang lain menciptakan kekuatan baru melalui Gerakan Aksi Kamisan di Jakarta.

Dalam laporan para peserta tentang penderitaan kolektif, tema kebutuhan akan keterhubungan dan interaksi dengan orang lain sering muncul, yang menanamkan harapan pada orang lain sebagai inti dari coping mereka. Selain itu, berkenaan dengan bagaimana mereka memilih untuk merawat ingatan traumatis di masa lalu, semua peserta menggambarkan pengalaman mereka yang mengidentifikasi diri sebagai “korban kejahanan negara” yang harus mereka hadapi hingga keadilan berpihak pada korban. Strategi penanggulangan individu dan kolektif ini berkontribusi dalam membantu mereka dalam menghadapi ingatan traumatis yang menyakitkan menuju pemulihan dan penyembuhan secara kolektif.

“Saya itukan dulu di pimpinan Fraksi Golkar, setelah wawan meninggal saya dipindahkan ke divisi keuangan. Tapi kata wartawan itu cuman nyari kelemahan mbak, supaya bisa dipecat. Tapi ternyata ga dipecat-pecat. Bahkan saya mau diperpanjang, karena waktu itu saya sebenarnya ga mau di keuangan. Jadi, kalau pimpinan-pimpinan itu kalau ketemu saya, saya bilang cari orang lain. saya ini bekerjanya tidak seperti yang dulu. Dalam hidup saya punya dua prioritas yang sama, ketika saya memutuskan untuk bekerja, karena dulu kan saya mau berhenti bekerja, tapi saya bertanggung jawab semampu saya untuk bekerja dengan kemampuan saya. Tetapi saya juga mempunyai prioritas untuk menghadapi peristiwa penembakan wawan.”⁴

1. Kewajiban

Merebut kembali diri setelah kehilangan traumatis dan menyuarakan kembali pengalaman mereka ditemukan dalam kutipan Sumarish yang berupaya bangkit setelah pengalaman yang menyakitkan.

“Saya punya keinginan mengetahui kenapa wawan ditembak, seperti apa tentara dan polisi dalam menghadapi orang-orang yang ikut berdemonstrasi, berarti saya harus turun ke jalan. Nah, waktu turun ke jalan pada bulan April tahun 1999 itu, saya ikut demo aksi aktivis perempuan setiap hari Jumat, tapi saya hanya mengikuti sampai dua kali terus kemudian dilarang. Kemudian, kami dan anak-anak PRK itu, dipertemukan dengan korban Mei dan semuanya diminta untuk berbicara, tetapi pada umumnya mereka yang

⁴ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

ke depan tidak mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, yang keluar adalah air mata. Kemudian, dia kayak menggiring gitu yah, jadi nanti kita akan memperingati satu tahun peristiwa Mei 1998, berarti kita harus berkumpul, harus rapat. Akhirnya, setelah rapat ada yang berbicara, apa manfaatnya, ada manfaatnya ngga pertemuan seperti ini? terus akhirnya, kita mengatakan kita mencari kebenaran, mencari kebenaran itu dengan mendatangi lembaga-lembaga terkait seperti DPR RI, ke Kondam Jaya, dan ke DPR komisi itu sampai ke fraksi kita datangi semua.”⁵

Secara spesifik, kutipan di atas menunjukkan narasi Sumarsih yang mencerminkan transformasi diri, identitas, dan rasa agensi yang muncul sebagai kewajiban untuk mengambil tindakan setelah pengalaman kehilangan putranya pada peristiwa Semanggi I. Kewajiban untuk melakukan sesuatu. Apa arti rasa kewajiban bagi identitas seseorang? Dari mana kebutuhan untuk berpartisipasi berasal dan apa artinya bagi kehidupan sehari-hari keluarga korban? Dalam kedua narasi peserta yang diwawancara mencatat bahwa mereka berkewajiban untuk mengambil tindakan baik sendiri maupun dengan orang lain mengenai kasus individu mereka dan berusaha untuk membangun ruang publik untuk mendidik masyarakat tentang kejahatan negara di masa lalu dan masa kini. Meskipun peserta berbicara mengenai strategi coping mereka dengan cara yang cukup unik, semuanya merujuk pada bagaimana peningkatan rasa ketahanan dan pertumbuhan sebagai hasil dari prosesnya melalui masa-masa yang sulit.

Peningkatan rasa kewajiban dan ketahanan mereka juga didasarkan pada upaya keluarga korban untuk membangun ruang publik. Lingkaran bercerita yang terdapat dalam Aksi Kamisan menggambarkan dua aspek utama, yaitu: Pertama, lingkaran bercerita dialami sebagai kebutuhan untuk menolak budaya

⁵ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

diam, sebagaimana dampak yang kerap kali dialami oleh korban pasca kekerasan. Bagi sebagian besar dari mereka yang diwawancara, Aksi Kamisan menjadi ruang yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan cerita mereka sebagai korban kejahanan negara dan menghubungkannya dengan peserta aksi dari lintas generasi. Kedua, lingkaran bercerita dalam Aksi Kamisan yang dikenal dengan sesi “refleksi” ini mencerminkan adanya pola dan interaksi melalui proses mendengarkan, mengamati, dan ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh korban. Kedua peserta memosisikan diri mereka sebagai seseorang yang ingin terus memberikan kesaksian dan merawat ingatan traumatis dari pengalaman hidupnya yang menarik perhatiannya pada proses membangun situs perlawanan dan pembebasan dari penindasan politik.

Komitmen dan sikap agen yang sama hadir dalam catatan Paian, yang berupaya berjuang untuk kepastian hukum putranya yang diculik dan dihilangkan secara paksa pada 1998 di Jakarta.

“Kami ingin memperjuangkan keadilan untuk anak kami yang belum kembali sejak peristiwa 27 tahun yang lalu. Kami ingin terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Ucok adalah anak saya yang hilang oleh Tim Mawar, dan kami akan terus mengingatnya. Kami ingin kepastian hukum atas anak kami, dan kami ingin agar tak ada lagi pelanggaran HAM seperti penghilangan paksa yang terjadi di masa depan. Penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu menjadi bukti negara berupaya melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya di masa depan agar tak terulang kembali.”⁶

⁶ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” Wawancara, 22 Juli 2024.

Mereka dengan jelas menggambarkan rasa afiliasi dan makna yang sangat kuat karena mereka terus terlibat aktif dalam mengambil bagian dalam merawat ingatan sebagai korban kejahanan negara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sumarsih, semangat dan harapan Sumarsih dalam memperjuangkan keadilan bagi Wawan dan kawan-kawannya yang meninggal pada peristiwa Semanggi I dan Semanggi II.

“Saat saya dilarang aksi oleh polisi, saya bilang kalau langgar melanggar itu sama, saya melanggar Undang-Undang tahun 1998 tapi negara juga melanggar perintah Tuhan, melanggar Konstitusi, saya bilang gitu. Tidak usah disuruh bubar, selesaikan kasusnya di pengadilan, sesuai janji para presiden. Kan waktu itu, Habibie presidennya juga bilang pemerintah akan menyusut peristiwa penembakan mahasiswa Semanggi dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Tapi akhirnya tidak jadi keluar. Saya melempar telur di sidang paripurna pada saat laporan pansus trisakti, semanggi I dan II karena menilai kasus tersebut bukan pelanggaran HAM berat.”⁷

Cerita Sumarsih melambangkan komitmen terhadap nilai-nilai dan ketekunan seseorang, terlepas dari hambatan yang dihadapi pada tingkat pribadi, profesional, dan sosial.

“Waktu itu, Presiden Jokowi mau lewat, kita didorong untuk minggir dulu, terus kalau ada tamu negara juga begitu, dorong-dorongan terus. Selain itu, pernah menjelang 17 Agustus, kami kan bawa tumpeng, kita menamakannya tumpeng pelanggaran HAM, biasanya itu ada tulisan-tulisan kasus pelanggaran HAM, dan dibawa kesini. Namun, dua hari sebelum hari-H, saya di telepon terus sama orang Polda supaya membatalkan aksi hari itu, tapi saya tetap bertahan untuk tetap aksi, akhirnya dia bilang ‘ya sudah kalau ibu masih tetap bertahan, tapi keselamatan ibu dan kawan-kawan bukan di tangan kami tapi ada di tangan baju hijau’ terus kita dari Gambir sampai disini kok bisa lolos masuk kesini, gitu yah. Tak lama kemudian, breukkk, polisinya banyak, kita diusir, terus saya sampai nangis, nangis karena tiba-tiba digeruduk banyak polisi, tapi akhirnya kita bertahan dan bisa melakukan Aksi Kamisan sekitar setengah jam.”⁸

⁷ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

⁸ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

Kategori ini mencakup tema-tema yang menggambarkan efek destruktif dari pengalaman kehilangan yang traumatis dan mencerminkan sifat yang meresap dari pengalaman traumatis yang dialami oleh individu. Konsekuensi fisik, psikologis, dan psikososial terhadap mereka secara keseluruhan merupakan dampak nyata dari berbagai kekerasan politik 1997-1998 yang terjadi di masa lalu dan mendorong individu bangkit melakukan perlawanan.

Sumarsih menceritakannya dengan nada kecewa karena telah mengabaikan peristiwa tragis yang terjadi sepanjang tahun 1997-1998 di Jakarta. Paian juga menekankan kekecewaan terhadap negara karena belum mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan pelanggaran HAM Berat di masa lalu, khususnya pada peristiwa penculikan dan penghilangan paksa yang dialami oleh putranya.

“Awalnya kami sangat percaya kepada Jokowi, pada tahun 2014, dia mencalonkan diri, dan salah satu nawacita dalam visi misinya adalah menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama pada peristiwa penculikan dan penghilangan paksa. Namun, tak lama berselang ia terpilih menjadi presiden, ia kemudian mengangkat berbagai jenderal yang dulu dinilai bertanggung jawab dalam kasus penghilangan paksa ini. Kami sangat kecewa atas pemerintah Jokowi, kami merasa dibohongi, dan dikhianati. Apalagi, saat itu ia mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019. Hal ini tentu melukai harapan kami.”⁹

Dalam kutipan di atas, Paian menekankan kekecewaannya pada presiden Jokowi karena dinilai telah berkhianat dan mengingkari janjinya dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Oleh karena itu, untuk merawat ingatan tentang kejahatan negara, Paian membangun diri dengan gigih tanpa rasa takut melalui berbagai aktivitas yang terkait dengan kasus anaknya,

⁹ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” *Wawancara*, 22 Juli 2024.

seperti berpartisipasi dalam Aksi Kamisan dan menjadi ketua Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang kemudian digantikan oleh Mugiyanto yang merupakan penyintas/korban penghilangan paksa.

Demikian pula, Sumarsih secara aktif dan terbuka mengemukakan atas berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu, terutama penembakan aktor bersenjata yang menewaskan anaknya pada peristiwa semanggi 1. Perubahan tindakannya (yang sebelumnya bekerja di lembaga pemerintahan menjadi aktivis kemanusiaan) menyebabkan jejaring sosial baru yang meningkatkan risiko terhadap keselamatannya. Terlepas dari aspek tersebut, Sumarsih menunjukkan pentingnya tindakan mereka dalam membantunya untuk melewati masa sulit dengan bersama-sama mengingatkan negara dan masyarakat tentang peristiwa traumatis di masa lalu.

Dalam konteks yang dieksplorasi di sini, mengambil tindakan dan kewajiban yang sering dimaksudkan merujuk pada tuntutan terhadap negara untuk memenuhi kewajibannya kepada korban sebagai wujud dan komitmennya dalam mengakhiri impunitas. Seperti disebutkan sebelumnya, korban kejahatan negara mewakili sektor-sektor yang secara historis terpinggirkan secara politik. Oleh sebab itu, tindakan mereka menunjukkan peran baru sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab setelah pengalaman kehilangan traumatis mereka untuk menuntut keadilan.

2. Tempat Tinggal Bersama: Merawat Ingatan Tetap Hidup

Dalam memperbaiki ikatan komunal yang retak akibat penindasan sosial politik, tempat umum menjadi salah satu aspek penting bagi korban dengan

trauma sosial politik yang dapat membangun kembali rasa kebersamaan.¹⁰

Respons ini terlihat pada keluarga korban yang membentuk Aksi Kamisan di Jakarta sebagai ruang dalam mempromosikan cerita dengan pertemuan antargenerasi dan antarkota terkait ingatan kekerasan politik di masa lalu.

Tindakan yang terjalin kuat dari keluarga korban merujuk pada pelestarian ingatan tentang kehilangan orang tercinta dengan menyebarkan informasi tentang siapa mereka dan bagaimana mereka dibunuh karena kejahatan negara.

“Saya pernah datang ke salah satu sekolah, dan membagi cerita ini ke anak-anak, mereka bahkan menangis saat mendengar cerita saya. Saya juga pernah diundang di salah satu kampus di Jakarta (UIN Syarif Hidayatullah) di fakultas Hukum menjadi narasumber, dan menceritakan kisah ini kepada mereka.”¹¹

Contoh lain dari hal ini adalah Sumarsih yang masih membuat hubungan dengan kenangan anaknya tetap hidup secara simbolis melalui ingatan bersejarah dan keterlibatannya dalam gerakan sosial:

“Dia (Wawan) juga suka menulis puisi, puisinya ada yang dimusikalisasi oleh Usman Hamid dari Amnesty International.”¹²

Penting juga untuk dicatat bahwa memori sejarah yang lebih besar melalui identitas simbolik memungkinkan warisan ingatan hingga lintas generasi. Pada saat yang sama, generasi masa depan akan mengajukan pertanyaan yang sama tentang siapa, mengapa, dan sejauh mana penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu? Oleh karena itu, upaya ini menggambarkan suatu pola yang terus terikat dalam membentuk dukungan pada keluarga korban untuk mencari kebenaran, keadilan, dan pemulihan secara kolektif untuk bergerak maju.

¹⁰ Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 209.

¹¹ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998,” Wawancara, 22 Juli 2024.

¹² Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semangi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

Kutipan yang sama hadir dalam tema di bawah ini, keluarga korban menarik perhatian pada makna tindakan mereka dalam menuntut keadilan pada negara atas kematian putranya. Ini merupakan ekspresi yang menggarisbawahi perubahan individu dari pengalaman traumatis yang menyakitkan menuju pemulihan kolektif dan mempengaruhi sikap politiknya saat ini.

C. Pemulihan Kolektif

Pemulihan pasca kehilangan tak terbatas dalam individu korban untuk mengingat peristiwa kehilangan traumatis mereka, melainkan beralih pada pemulihan secara kolektif dalam Gerakan Aksi Kamisan. Sumarsih merujuk pada kesadaran diri setelah kehilangan traumatis, keingintahuan tentang seperti apa polisi dan tentara dalam menghadapi mahasiswa saat berdemonstrasi. Rasa kebermaknaan yang dihasilkan tidak hanya dari pengalaman traumatis yang mengakibatkan putranya meninggal, tetapi juga menempatkannya dalam realitas sosial saat ini.

“Ternyata, polisi itu tidak semuanya jahat. Jadi yang memberikan ide untuk buat kepada presiden itu adalah kapolsek Gambir. Waktu panas seperti ini, saya dipanggil sama kapolsek Gambir, namanya Apollo Sinambela. Beliau bilang, ibu di situ panas bu, disini ngobrol di bawah pohon. Dulu di situ (dia menunjuk ke tempat di mana pohon berbaris di sebelah istana negara), Ia bilang, ibu itu kan demo, ibu kan cari perhatian, kok cari perhatian cuman berdiri seperti itu, bikin surat ke presiden. Jadi aksinya kan dari bulan januari tapi kami baru mengirim surat pada presiden pada bulan Juli.”¹³

Komitmen dan harapan keluarga korban untuk terus mencari kebenaran dan keadilan pada akhirnya menciptakan suatu titik temu dari peristiwa yang mengakibatkan putranya terbunuh. Sumarsih dengan jelas mengungkapkan:

¹³ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

“Pernah mau digotong sama polisi dan beton itu kan ada besinya yah, tangan saya dan jarinya pernah kena besi itu. Jangan gotong saya, ayok ke kantor polisi, kantor polisi dimana, disini saja bisa menyelesaikan masalah itu paling susah diajak kompromi. Diam-diaman sama kaporsek, Namanya pak Bambang, akhirnya dia hanya tiga bulan disini terus kemudian tidak pernah bertegur sapa selama tiga bulan dia disini termasuk juga pak harto diganti yang lain itu juga orangnya jahat, dia pernah doakan ada yang bilang “ibu tadi di doakan agar nanti disambar petir” jadi memang waktu itu musim hujan dan ada yang disambar petir, nah teruss suatu ketika setelah diam diaman, setelah akhir tahun setelah natal gitu yah, wakaporsek, saya dulunya disini, pak kaporsek itu nyamperin saya “ibu saya minta maaf, demonya ibu itu demo orang benar, silahkan ibu teruskan demo ini.”¹⁴

Pengalaman keluarga korban di Jakarta yang berjuang untuk menghadapi trauma kehilangan, merawat ingatan sejarah dipandang sebagai bagian penting untuk menolak lupa atas kejahanan negara di masa lalu. Strategi ini merupakan cara bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu untuk mengkomunikasikan, menceritakan, dan mendokumentasikan ingatan traumatis mereka terkait kekerasan negara di ruang publik.

Kutipan di bawah ini menguraikan pengalaman penyembuhan keluarga korban dengan berbagi pengalaman kolektif tentang rasa sakit pada orang lain dan menunjukkan pentingnya untuk terus mengingat dan merekonstruksi masa lalu ke masa kini untuk membuka ruang dialog interaktif dan pemulihan secara kolektif.

“Sampai sekarang ini, menurut saya aksi kamisan itu menyenangkan sekali, tiba-tiba ada orang yang ngajarin nyanyi, terus kemudian ada anak-anak SMP/SMA, saya bersyukur sekali.”¹⁵

Perasaan menyenangkan dan rasa syukur berasal dari ikatan yang terhubung antara peserta aksi dan keluarga korban, dengan cara hadir dan berpartisipasi dalam

¹⁴ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

¹⁵ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” Wawancara, 15 Juli 2024.

Aksi Kamisan menciptakan kembali makna rasa kebersamaan dan solidaritas di antara keluarga korban dengan komunitas. Adapun penjelasan dari “ngajarin nyanyi” yang dijelaskan Sumarsih terkait dengan pertunjukan seni yang dilakukan oleh berbagai peserta aksi seperti menyanyikan lagu “darah juang” dan lagu yang berjudul “pasti menang.” Dalam kata-katanya, dia mengidentifikasikan dirinya dengan peserta aksi melalui hubungan mereka di ruang kolektif, dan itu memberinya rasa koneksi. Terlepas dari tantangan dan kesulitan yang kerap kali ia dapatkan selama berpartisipasi dalam Aksi Kamisan, dia merasa senang dan itu merupakan sumber pertumbuhan pribadi.

Sementara pengalaman pada masing-masing korban memiliki variasi dan khas untuk setiap peserta, hal ini terutama beberapa pertemuan penting dalam data diidentifikasi pada Paian Siahaan yang mencatat pentingnya dukungan para aktivis dalam menghadapi pengalaman traumatis mereka:

“Saya sangat berterimakasih kepada adik-adik yang masih tetap memperjuangkan keadilan bagi para korban, bagi kami, hal ini sangat membantu kami dan memberikan kekuatan pada kami. Saya sangat senang saat anak-anak muda ikut dalam Aksi Kamisan, itu cukup membantu dan menguatkan kami sebagai orang tua yang kehilangan anak. Setiap Aksi Kamisan kan, kadang banyak anak-anak muda yang ikut dalam Aksi Kamisan di Jakarta atau di kota-kota lain. Selain itu, kami juga dapat bertemu dengan korban-korban lain, yang mengalami hal sama dengan yang saya alami dan banyak anak muda yang juga ingin menulis tentang pengalaman kami, utamanya peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan.”¹⁶

Sama halnya dengan Sumarsih, Bagi paian, dukungan sosial sebagai sumber utama ketahanan dalam pengalaman trauma yang dihadapi pasca kehilangan. Perasaan memperoleh dukungan membuatnya merasa dia memiliki kekuatan,

¹⁶ Paian Siahaan, “Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1998” Wawancara, 22 Juli 2024.

bahwa dia senang, dan semua aspek diri ini berkontribusi pada korban individu yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan percaya bahwa memenuhi kewajiban dalam mengambil tindakan dan menempatkan diri mereka dalam hubungan serta interaksi dengan orang lain dapat membantu dirinya pulih pasca kehilangan. Baik apa yang mereka putuskan untuk dilakukan maupun keputusan mereka dalam mengambil tindakan yang berkaitan langsung dengan pengalaman kehilangan anaknya melibatkan agensi dan menempatkan mereka dalam konteks sosial. Subjektivitas mereka juga mencerminkan pergeseran (dari ketidakberdayaan menuju pemberdayaan) dalam hal tindakan aktual yang mereka ambil pasca kehilangan.

Kutipan di bawah ini menggambarkan sikap dan penerimaan diri Sumarsih dalam menghadapi kenyataan hidup putranya yang meninggal dalam peristiwa Semanggi I dan menunjukkan makna kemanusiaan yang mendalam.

“Kadang-kadang, saya berpikir ini mungkin sudah jalannya wawan menuju pulang ke sang pencipta. Kalau saya sekarang masih berjuang, mencari kebenaran, dan keadilan saat ini, yang saya permasalahkan adalah cara meninggalnya wawan dan kawan-kawanya. Membunuh itu kan dilarang, oleh Tuhan dan Konstitusi.”¹⁷

Begini Sumarsih menghubungkan pengalaman dirinya setelah fase yang menyakitkan, rasa kewajiban memicu tindakannya dalam membangun situs perlawanan untuk keadilan. Kewajiban untuk mengambil tindakan setelah kehilangan telah melampaui ingatan traumatis pada keluarga korban dan telah meluas ke dalam aspek kesadaran tentang pentingnya menjadi manusia seutuhnya.

¹⁷ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

“Dukacita saya bertransformasi menjadi cinta atas sesama manusia. Saya selalu bilang dalam setiap kesempatan, cinta saya terhadap Wawan, telah bertransformasi menjadi cinta atas sesama.”¹⁸

Kata “dukacita” ini menguraikan pengalaman menyakitkan Sumarsih dan kemudian membuatnya merasa bahwa dia dipahami dan juga memahami orang lain. Pengalaman kehilangan “darah dan “daging” mengikatnya dengan orang lain dan tidak terbatas pada pengalamannya yang menyakitkan, namun cinta pada putranya mengalir ke dalam diri sesama manusia yang mencerminkan konteks yang lebih luas untuk melihat rasa sakit dalam kehilangan pada orang lain.

D. Ringkasan Temuan, Diskusi, dan Implikasinya

Narasi keluarga korban yang termasuk dalam analisis ini mencerminkan tema kekerasan politik, kehidupan dan aktivitas keluarga korban, narasi trauma, dan perjalanan pemulihan individu menuju proses pemulihan trauma secara kolektif melalui Gerakan Aksi Kamisan. Tema-tema ini mencerminkan gagasan Martin Baro tentang psikologi pembebasan. Suatu konsep psikologi konseling yang mendukung memori sejarah dan refleksi kritis yang membantu membangun jenis subjektivitas pada korban kekerasan secara kreatif. Tema-tema yang diidentifikasi dalam bab ini mencerminkan literatur yang ada dalam psikologi pembebasan melalui pengalaman traumatis korban pelanggaran HAM. Dengan memahami pengalaman korban, pembaca dapat memahami mekanisme tentang mengapa keluarga korban memilih untuk merawat ingatan traumatis tentang kekerasan dan terlibat dalam perjuangan untuk pembebasan.

¹⁸ Maria Catarina Sumarsih, “Keluarga Korban Semanggi I,” *Wawancara*, 15 Juli 2024.

Diskusi ini berfokus pada tema-tema mengenai pengalaman yang muncul dalam narasi keluarga korban kekerasan politik 1997-1998 di Jakarta. Saya telah membahasnya di bawah subjudul terpisah, namun ketiga bidang tematik ini saling berhubungan. Oleh karena itu, setiap bagian di bawah ini harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Misalnya, kehidupan dan aktivitas sebelum peristiwa kehilangan yang traumatis tidak dapat dievaluasi sepenuhnya secara terpisah dari narasi trauma pada keluarga korban dan konteks kekerasan politik yang melatarbelakanginya. Demikian pula, tindakan pasca kehilangan traumatis melalui pemulihan individu dan kolektif dalam Gerakan Aksi Kamisan tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendorong peserta untuk membangun situs perlawanan dan merawat ingatan kekerasan politik di masa lalu. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa bagian-bagian di bawah format tema utama dalam Bab 3 dilakukan dengan kesadaran akan saling keterkaitannya. Juga, menggugah lingkaran hermeneutik yang membentuk dasar metodologis studi ini untuk memahami keseluruhan pengalaman keluarga korban pasca peristiwa traumatis.

Dalam membahas pengalaman mereka terhadap peristiwa trauma yang menyakitkan dari kekerasan politik saat dan setelah kehilangan, posisi peserta dapat dicirikan dalam sikap yang didominasi oleh rasa agensi. Tindakan-tindakan mereka dipandu oleh kompas dan nilai-nilai kehidupan dan konteks sosial yang membentuk dan memfasilitasi penilaian positif setelah peristiwa traumatis menimpa diri dan keluarga mereka. Pada saat yang sama, hal itu juga memungkinkan para peserta untuk membangun pengalaman traumatis mereka

sebagai pengalaman yang bermakna, baik selama peristiwa traumatis maupun setelah kehilangan dengan berani melakukan perlawanan untuk pembebasan dari politik yang menindas.

Temuan ini menunjukkan pentingnya memahami kekerasan politik yang menindas dari pengalaman korban dan mempertimbangkan tindakan aktivisme mereka setelah peristiwa traumatis sebagai proses pemulihan kolektif.¹⁹ Para peserta menggambarkan tindakan mereka sebagai kewajiban untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi putranya yang meninggal. Menurut Marry Watkins dan Shulman, ruang publik yang aman sangat penting untuk menciptakan kesadaran kritis, menghubungkannya dengan pembebasan secara psikologis yang bertentangan dengan pendekatan yang telah diwariskan dalam psikologi Barat.²⁰ Penolakan terhadap paradigma yang cenderung individualistik ini dapat tercermin dalam narasi kedua peserta yang menguraikan perhatiannya pada peran penting yang dimainkan oleh konteks sosial mereka. Misalnya, solidaritas dan kepedulian para aktivis dalam mendukung keluarga korban pasca kehilangan.

Studi ini dapat memperjelas hubungan yang saling terkait antara penderitaan psikologi individu dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana mereka hidup. Misalnya, dalam semua catatan peserta, ada benang merah yang jelas tentang bagaimana merawat ingatan dapat memberdayakan keluarga korban dalam membangun makna pemulihan kolektif mereka melalui Gerakan Aksi

¹⁹ Mary Watkins dan Helene Shulman, *Toward Psychologies of Liberation* (London: Palgrave Macmillan UK, 2008), 53.

²⁰ Watkins and Shulman, *Toward Psychologies of Liberation*, 20.

Kamisan. Menariknya, apa yang muncul dari catatan para peserta adalah bahwa pengakuan negara melalui penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan permintaan maaf resmi dari negara dinilai belum sepenuhnya menjawab tuntutan keluarga korban karena masih gagal mengadili para pelaku kekerasan tersebut.

Temuan ini juga menemukan bahwa tindakan untuk membangun tempat tinggal (*homeplace*) bersama untuk merawat ingatan berkontribusi meningkatkan kesadaran kritis, mengembalikan makna kehidupan korban dan berkontribusi pada dunia bersama yang mereka bagikan dengan orang lain. Kedua peserta dengan jelas melaporkan bahwa mengambil tindakan perlawanan atas penindasan politik di masa lalu sangat terkait dengan kewajiban dan kebutuhan untuk memulihkan trauma mereka. Kewajiban dan kebutuhan yang jika tidak direalisasikan dalam konteks pertanggungjawaban negara akan melahirkan kekerasan baru dan trauma yang berkepanjangan.

Temuan yang ditangkap dalam narasi kedua peserta juga menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam membangun kesadaran kritis pada korban. Kelly Oliver menyebutnya sebagai dekolonisasi psikis atau suatu alternatif yang dapat mencegah dampak penindasan yang dihasilkan dari kurangnya dukungan sosial dengan menciptakan komunitas perlawanan.²¹ Oleh karena itu, melalui komunitas perlawanan, individu dapat berimajinasi dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Ini menggambarkan suatu pembebasan ruang psikis yang berjalan seiring dengan penciptaan ruang sosial yang saling mendukung satu sama

²¹ Oliver and Edwin, “Psychic Space and Social Melancholy,” 49.

lain. Seperti yang ditunjukkan dalam bab 2, bagi Kelly Oliver, pemulihan individu hanya dapat diperoleh dari cara mereka bertindak melampaui rasa sakit dan berupaya membangun dan menemukan kembali diri dalam konteks sosial, seperti dalam komunitas perlawanan.

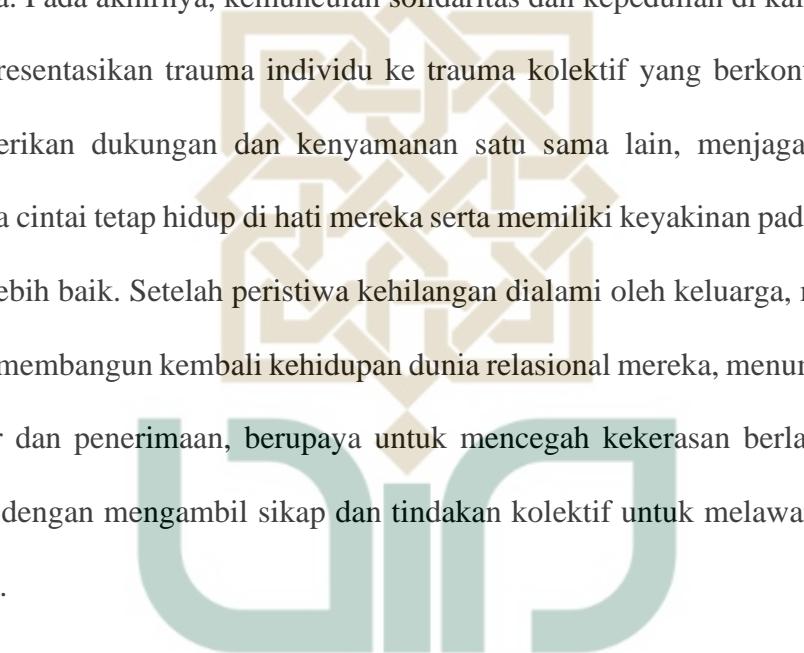
Terakhir, temuan ini berkontribusi pada teori tentang psikologi trauma dan memori yang mencakup pemahaman tentang bagaimana individu dan sosial membangun diri mereka dengan orang lain, sejarah, komunitas, dan budaya pada tingkat paling dasar. Studi ini juga berupaya menekankan penolakan pada paradigma individualistik yang cenderung berfokus pada praktik bisnis tanpa mempertimbangkan hubungan individu dengan jenis rekonsiliasi dengan orang lain dalam komunitas. Saya berargumen bahwa pada akhirnya tugas psikologi dan konseling adalah membuat individu dan sosial mengambil peran untuk mendengarkan, merasakan, dan mengkomunikasikan kembali ingatan kekerasan tentang masa lalu melalui situs perlawanan. Ini merupakan upaya untuk menciptakan proses pemulihan, penyembuhan, dan pemberdayaan secara holistik dan progresif pada korban pasca kekerasan politik.

E. Kesimpulan

Terlepas dari pengalaman traumatis yang dialami oleh keluarga korban dan dinamika psikologis yang mempengaruhi kehidupan, nilai, dan ikatan sosial mereka, semua peserta nampaknya telah mengintegrasikan dan melampaui rasa sakit, takut, dan ketidakberdayaan mereka setelah peristiwa traumatis. Upaya untuk

membangun makna kolektif yang berakar kuat pada keyakinan dan harapan setelah kehilangan traumatis dapat tercermin dalam Gerakan Aksi Kamisan yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Selama peristiwa kehilangan, mereka menjalani kehidupan yang menyakitkan, merasakan dan secara eksistensial mengikuti kompas dari nilai-nilai kehidupan mereka. Pada akhirnya, kemunculan solidaritas dan kepedulian di kalangan aktivis merepresentasikan trauma individu ke trauma kolektif yang berkontribusi dalam memberikan dukungan dan kenyamanan satu sama lain, menjaga orang yang mereka cintai tetap hidup di hati mereka serta memiliki keyakinan pada masa depan yang lebih baik. Setelah peristiwa kehilangan dialami oleh keluarga, mereka fokus untuk membangun kembali kehidupan dunia relasional mereka, menumbuhkan rasa syukur dan penerimaan, berupaya untuk mencegah kekerasan berlanjut di masa depan dengan mengambil sikap dan tindakan kolektif untuk melawan penindasan politik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA